



*****  *****

TANGGUNG JAWAB SUPERMARKET TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DI RANTAI PASOK:

TANTANGAN YANG BELUM SELESAI
DALAM RANTAI PASOK PANGAN LAUT
DAN DESAKAN BAGI SUPERMARKET
UNTUK MELAKUKAN UPAYA LEBIH



© Oxfam International dan Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia, Juni 2018

Makalah ini disusun oleh tim kampanye Oxfam di seluruh dunia, dengan penelitian dan analisis tentang Indonesia yang ditulis bersama dengan Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut tentang topik yang dibahas dalam makalah ini, silakan kirim email ke advocacy@oxfaminternational.org

Publikasi ini adalah hak cipta tetapi teks dapat digunakan secara gratis untuk tujuan advokasi, kampanye, pendidikan, dan penelitian, asalkan sumbernya dicantumkan dengan lengkap. Pemegang hak cipta meminta agar semua penggunaan tersebut dilaporkan kepada mereka untuk tujuan pengkajian dampak. Untuk menyalin dalam keadaan lain, atau untuk digunakan kembali dalam publikasi lain, atau untuk terjemahan atau adaptasi, pihak yang berkepentingan perlu meminta izin dan mungkin akan dikenakan biaya.

Oxfam International

Informasi dalam publikasi ini benar pada saat akan diterbitkan.

Diterbitkan oleh Oxfam GB untuk Oxfam International dan Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia sesuai dengan ISBN 978-1-78748-249-4 pada bulan Juni 2018. DOI: 10.21201 / 2018.2494

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, Inggris

Foto sampul: Udang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Indonesia. Foto: Adrian Mulya / Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia

Tulisan ini menindaklanjuti laporan kampanye global Ripe for Change: R. Willoughby dan T. Gore. (2018). *Ripe for Change: Ending human suffering in supermarket supply chains*.



OXFAM

Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia

Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia adalah sebuah aliansi yang beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat sipil besar di Indonesia yang didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan dan hak-hak para pelaku penting (dan rentan) yang terlibat di sepanjang rantai pasok pangan laut dari produsen termasuk para petambak, para pekerja pabrik pengolahan, para pekerja kapal perikanan, hingga ke konsumen. Adapun anggota dari aliansi ini yakni Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Institut Solidaritas Buruh Surabaya (ISBS), Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku yang terlibat dalam rantai pasok pangan laut. Selama setahun ini, aliansi telah melakukan berbagai upaya untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rantai pasok dengan melakukan penelitian, mengadvokasi perusahaan untuk mematuhi hukum dan kebijakan di Indonesia, termasuk mendiskusikannya dengan kementerian-kementerian terkait untuk menegakkan dan menerapkan kebijakannya, serta melakukan kampanye untuk memobilisasi warga negara dan konsumen Indonesia untuk peduli dengan permasalahan ini.



**ALIANSI PANGAN LAUT
BERKELANJUTAN
INDONESIA**

The Sustainable Seafood Alliance Indonesia

KIARA

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan



**YAYASAN LEMBAGA
BANTUAN HUKUM
INDONESIA**



Tantangan yang belum selesai dalam rantai pasok pangan laut dan desakan bagi supermarket untuk melakukan upaya lebih

Rantai pasok pangan internasional menyediakan lapangan kerja bagi puluhan juta perempuan dan laki-laki di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan besarnya potensi sektor swasta untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan. Namun sayangnya, banyak di antara mereka yang bekerja di sektor ini bekerja dalam kondisi mengerikan. Tantangan yang masih belum selesai dalam rantai pasok pangan laut memberikan gambaran jelas mengenai permasalahan yang dapat timbul serta pentingnya bagi para pemangku kepentingan untuk mengatasi akar penyebabnya. Tulisan ini merupakan rangkaian dari studi mendalam untuk memperkuat laporan kampanye global Oxfam yang bertajuk *Ripe for Change: Ending human suffering in supermarket supply chains* (Siap untuk Perubahan: Akhiri penderitaan manusia di rantai pasok supermarket).

Laporan ini menilai kemajuan terbaru dalam upaya pemenuhan hak-hak para pekerja di rantai pasok pangan laut yang berasal dari Asia Tenggara; dan menyediakan bukti baru terkait tantangan yang belum selesai dalam hal hak-hak para pekerja di Indonesia dan Thailand yang menjadi bagian dari rantai pasok udang untuk supermarket-supermarket di AS dan Eropa; serta secara khusus mengeksplorasi permasalahan seputar kekuatan supermarket dan perusahaan utama lainnya dalam memeras nilai lebih dari penyuplai mereka. Hasil dari metode kartu skor bagi retailer yang dilakukan oleh Oxfam dalam konteks 'Pekerja' menunjukkan bahwa masih banyak persoalan yang dapat dan perlu ditangani oleh supermarket untuk memperbaiki dampak mereka terhadap hak-hak pekerja di rantai pasok internasional, sesuai dengan tanggung jawab mereka yang diamanatkan oleh Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM).



Pekerja kapal di Thailand membongkar ikan sebelum mereka memilih dan menyortirnya lalu memindahkan ikan-ikan tersebut ke pabrik atau tempat penyimpanan berpendingin.

Foto: Suthep Kritsanavarin/Oxfam

PENDAHULUAN

PELANGGARAN TERHADAP HAK PEKERJA SANGAT ENDEMIS DALAM RANTAI PASOK SUPERMARKET

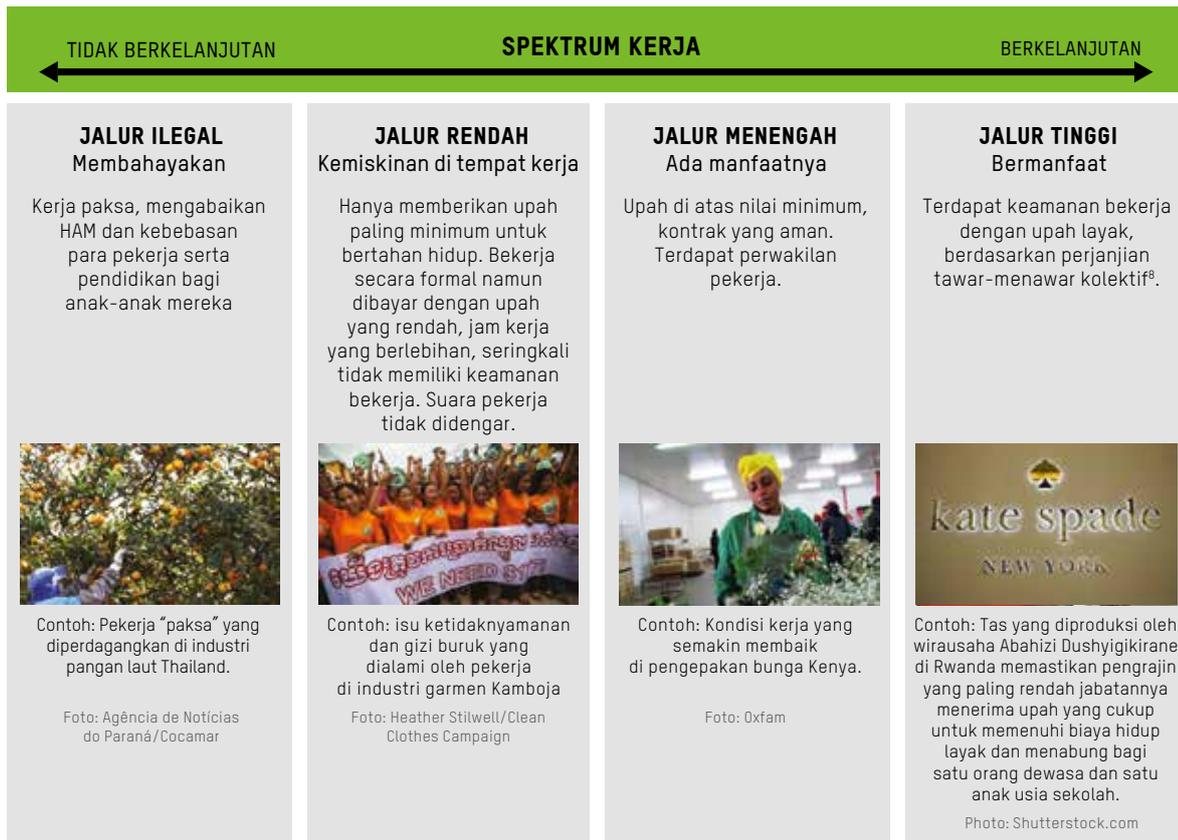
Puluhan juta orang saat ini bekerja dalam rantai pasok makanan global. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan bahwa terdapat sekitar 22 juta orang yang bekerja untuk perusahaan pengolahan makanan.¹ Namun itu hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Masih ada berjuta-juta orang lagi yang bekerja, baik secara formal maupun informal, sebagai buruh kasar di kebun berskala kecil, sebagai buruh musiman di perkebunan besar, di atas kapal perikanan di tengah laut, atau sebagai orang-orang yang berperan utama dalam pengolahan dan pengepakan di pasar dan pelabuhan di seluruh dunia.

Namun bagi kebanyakan masyarakat, pekerjaan-pekerjaan di atas hanya dibayar dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang mengesankan – dan mereka dimasukkan ke sebelah kiri dari spektrum kerja Oxfam (Gambar 1) – sementara itu, terlalu sedikit yang masuk di spektrum sebelah kanan.

Penelitian-penelitian ekstensif yang dipublikasikan pada peluncuran kampanye terbaru Oxfam menunjukkan berbagai contoh pelanggaran hak pekerja dan HAM dalam rantai pasok supermarket.² Mulai dari kondisi kerja mengerikan yang dialami para perempuan pemetik buah dan sayur di Italia bagian selatan³, hingga pekerja yang terpapar zat kimia berbahaya di perkebunan nanas di Kosta Rika⁴ dan upah yang begitu kecil bagi pemetik daun teh di India⁵. Penelitian yang kami lakukan telah membuktikan:⁶ bahwa para pekerja di seluruh dunia telah dikorbankan demi mengisi stok barang di rak-rak supermarket.



GAMBAR 1: SPEKTRUM KERJA DALAM RANTAI PASOK GLOBAL YANG BERVARIASI⁷



Sumber: diadaptasi dari R. Wilshaw. (2014). *Steps to a Living Wage in Global Supply Chains*. Diambil dari: <https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/steps-towards-a-living-wage-in-global-supply-chains-336623>. E. Soule et al. (2017). *A Social Enterprise Link in a Global Value Chain: Performance and Potential of a New Supplier Model*. Georgetown University Women’s Leadership Institute, Georgetown University, Washington, DC.

TENAGA KERJA BERKETERAMPILAN RENDAH (PEKERJA KASAR) YANG MEMASOK UDANG KE SUPERMARKET: SEBUAH KASUS YANG MENGERIKAN

Beberapa kasus paling mengerikan yang menjadi tajuk utama di media dalam beberapa tahun belakangan ini adalah terkait kerja paksa⁹ dalam rantai pemasok udang di supermarket yang berasal dari Asia Tenggara.¹⁰ Hal ini menjadi permasalahan, baik terhadap hak-hak pekerja di sektor ini, dan juga terhadap kemajuan yang terjadi setelah diperkenalkannya berbagai langkah selama beberapa tahun terakhir, sebagaimana dijelaskan pada Bagian 1. Namun, penelitian terbaru oleh Oxfam dan Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia yang dijelaskan dalam Bagian 2 – mengungkapkan bahwa masalah serius terus terjadi bagi perempuan dan laki-laki yang bekerja untuk memasok udang dan jenis pangan laut lainnya ke supermarket besar di Amerika Serikat dan Eropa .

Wawancara kami dengan para pekerja di kapal penangkap ikan Thailand¹¹ – yang dijelaskan dalam Kotak 5 – mengindikasikan bahwa penggunaan kerja paksa dan berbagai hal mengerikan lainnya dalam praktik ketenagakerjaan ternyata masih digunakan. Temuan kami memperkuat temuan-temuan dari laporan baru-baru ini,¹² yang menyimpulkan bahwa supermarket penjual udang dan pangan laut lainnya dari wilayah ini masih perlu didesak untuk mengatasi kondisi pekerja perikanan di balik produk-produk yang mereka jual.

Namun, bagi perempuan yang merupakan 80-90% dari tenaga kerja di pabrik pengolahan udang dan pangan laut lainnya¹³, permasalahan mereka ada di darat dan bukan di laut. Oxfam dan Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia mewawancarai pekerja dari beberapa perusahaan pengolah udang dan eksportir terbesar di Thailand dan Indonesia – yang masing-masing di antaranya memasok dan pernah memasok ke supermarket seperti Ahold Delhaize, Albertson, perusahaan

PARA PEKERJA YANG MENGUPAS UDANG DI INDONESIA HANYA MEMILIKI PENGHASILAN KURANG DARI €0.02 ATAU SETARA DENGAN RP 328,52 (JUNI 2018) UNTUK MENGUPAS 225 KG UDANG YANG DIJUAL DI SUPERMARKET BELANDA ALBERT HEIJN (DIMILIKI OLEH AHOLD DELHAIZE) DENGAN HARGA €5 ATAU SETARA DENGAN RP 82.130,82 (JUNI 2018).¹⁶

nasional seperti Aldi North dan Aldi South, Asda, Costco, Edeka, Jumbo, Kroger, Lidl, Morrisons, Rewe, Sainsbury's, Tesco, Walmart dan Wholefoods¹⁴ – Pekerja-pekerja melaporkan banyaknya contoh-contoh kondisi kerja yang tidak layak seperti yang dijelaskan dalam Kotak 2 – mengenai kondisi kerja 'low road/ jalur rendah' yang terangkum dalam Kotak 6.

Misalnya¹⁵:

- Di kalangan para pemasok di Thailand, upah yang diberikan sangat rendah, sehingga lebih dari 60% dari perempuan yang disurvei dikategorikan sebagai sangat rawan pangan dan bekerja dengan jam kerja yang melebihi waktu normal dilaporkan sudah menjadi hal yang rutin. Banyak dari mereka yang telah membayar biaya perekrutan, dan terlilit utang yang besar, hanya agar diterima bekerja mereka.
- Di kalangan para pemasok di Indonesia, para perempuan melaporkan bahwa mereka bekerja untuk mencapai target hingga 19 kg udang yang dikupas per jam di setiap *shift*, namun hanya untuk mendapat upah minimum. Hal ini berarti para pekerja yang mengupas udang di Indonesia hanya menerima penghasilan kurang dari €0.02 atau setara dengan Rp 328.52 (Juni 2018) untuk mengupas 225 kg udang yang dijual di supermarket Belanda Albert Heijn (dimiliki oleh Ahold Delhaize), dimana harga 1 kg udang adalah €5 atau setara dengan Rp 82.130,82 (Juni 2018).¹⁶
- Para pekerja di beberapa pabrik pengolahan melaporkan bahwa istirahat untuk ke toilet dan akses air minum dikontrol dengan ketat. Seorang pekerja di Thailand melaporkan hanya ada sembilan toilet yang tersedia untuk 1,000 pekerja, pekerja lain di Indonesia mengatakan bahwa hanya ada beberapa gelas minum yang tersedia untuk ratusan pekerja – dan beberapa di antara mereka mengeluh pernah mengalami infeksi kandung kemih karena menahan kencing yang dikarenakan terbatasnya waktu ke toilet.
- Di seluruh sektor, pekerjaan yang dilakukan sangat melelahkan, kerap mendapat kekerasan verbal dari atasan, dan akses terhadap serikat pekerja sangat terbatas.

Upah dan kondisi kerja ini sangat kontras jika dibandingkan dengan pendapatan dan kekayaan yang berada di ujung rantai pasok lainnya.

- Seorang perempuan yang mengolah udang di Indonesia atau Thailand harus bekerja lebih dari 6.000 tahun untuk mendapatkan gaji tahunan yang diterima oleh eksekutif tertinggi di Walmart dan selama lebih dari 2.000 tahun untuk menyamai gaji eksekutif Tesco.¹⁷
- Cukup dengan dengan 10% dari keuntungan yang diterima oleh para pemegang saham Walmart, Costco dan Kroger pada tahun 2016, kita dapat membayar lebih dari 600.000 pekerja pengolahan udang Thailand dengan upah layak.¹⁸

Melati, mantan pekerja pengolahan udang di Indonesia, menunjukkan udang cocktail yang kemungkinan diproduksi dari jerih payah pekerja udang dengan upah rendah dan berada dalam kondisi hidup yang buruk.

Foto: Adrian Mulya/Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia





SUPERMARKET DAPAT BERBUAT LEBIH UNTUK MENGHORMATI HAK-HAK PARA PEKERJA RANTAI PASOKNYA

Sebagaimana dinyatakan dalam laporan peluncuran kampanye terbaru Oxfam, akar penyebab pelanggaran hak-hak pekerja dalam rantai pasok pangan berhubungan dengan peningkatan kekuatan supermarket dan perusahaan besar lain sehingga mereka dapat memeras nilai ekonomi dari pemasok mereka, serta kurangnya kekuatan kolektif pekerja di banyak negara asal mereka.¹⁹

Kasus ini menunjukkan keterangan lebih lanjut mengenai tren tersebut. Penelitian terbaru Oxfam yang – dijelaskan dalam Bagian 3 – mengindikasikan bahwa supermarket di Jerman, Inggris, Belanda dan AS, rata-rata mengalami peningkatan dalam penjualan udang yang bersumber dari Indonesia dan Thailand – sama halnya dengan berbagai rantai pasok lainnya – sementara pendapatan yang tersisa untuk didistribusikan kepada pelaku ekonomi di negara-negara penghasil terus menurun.²⁰

Saat konsumen supermarket menuntut harga untuk terus turun, standar kualitas yang ketat, dan kenaikan biaya produksi, pelaku paling lemah dalam rantai pasok udang dan rantai pasok lainnya cenderung menanggung harga terbesar. Meskipun sudah ada berbagai reformasi kebijakan publik di negara-negara seperti Indonesia dan Thailand, hak-hak pekerja – terutama para pekerja migran dan perempuan pekerja – masih belum cukup terlindungi.

Sekalipun supermarket terbesar tidak dapat menyelesaikan masalah ini sendirian, tetapi *Oxfam's Supermarkets Scorecard* mengungkapkan masih ada banyak hal yang dapat dilakukan dan harus dilakukan oleh supermarket, baik secara individual maupun kolektif, untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja di rantai pasok tetap dihormati. Skor yang diberikan untuk kategori 'pekerja' – dijelaskan dalam Bagian 4 – menunjukkan bahwa:

- Belum ada supermarket yang sudah dinilai yang dalam tiga tahun terakhir telah menerbitkan sebuah Kajian Dampak Hak Asasi Manusia yang layak mengenai dampak kegiatan perusahaan terhadap pekerja dalam rantai pasoknya²¹.
- Belum ada supermarket yang berupaya dimanapun untuk mendukung kebebasan pekerja untuk berserikat, atau memastikan pemasok dibayar cukup agar memungkinkan pekerja mereka dibayar dengan upah layak.

Kondisi tersebut tidak seharusnya seperti ini. Walaupun tolak ukur baru yang dimiliki oleh Oxfam adalah sebuah tantangan tersendiri, terdapat sebuah argumen yang mendukung kesanggupan perusahaan untuk mencapainya, termasuk peluang perusahaan dalam menghasilkan produk yang lebih berkualitas, rantai pasok yang lebih tangguh, dan hubungan yang lebih jujur dengan para pelanggan supermarket mereka. Oxfam menyerukan kepada supermarket yang memimpin sektor pangan secara keseluruhan untuk mengalihkan kekuasaan kepada pekerja guna memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati.

Rekomendasi utama dirangkum dalam Bagian 4 bagi supermarket agar mereka mengetahui dan melihat dampak dari perusahaan mereka dengan menghormati hak-hak pekerja dalam rantai pasok pangan, dan agar mereka dapat melakukan tindakan berdasarkan analisis tersebut, baik di dalam maupun di luar rantai pasok mereka sendiri.

1. RISIKO TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM RANTAI PASOK UDANG DI SUPERMARKET

LEDAKAN PERDAGANGAN PANGAN LAUT GLOBAL

Perdagangan terhadap pangan laut di dunia sedang meledak - berkembang lebih dari 500% antara tahun 1976 dan 2014.²² Saat ini, pangan laut merupakan komoditas pangan yang paling banyak diperdagangkan dan bernilai lebih dari USD 150 miliar per tahun,²³ dan merupakan sumber pendapatan ekspor yang lebih besar bagi negara-negara berkembang dibandingkan gabungan komoditas-komoditas pertanian lainnya - seperti daging, tembakau, beras dan gula.²⁴

Terdapat dua faktor yang menjelaskan kisah pertumbuhan yang luar biasa ini. Pertama, permintaan untuk pangan laut yang meroket, terutama di negara-negara kaya: konsumsi global telah meningkat dua kali lipat dari tingkat pertumbuhan penduduk selama lima dekade terakhir.²⁵ Kedua, penyebaran budidaya tambak²⁶ bersamaan dengan ketersediaan tenaga kerja murah di negara berkembang, telah memungkinkan ekspansi produksi yang besar untuk memenuhi permintaan ini.²⁷

Namun, walaupun sektor ini sekarang menyediakan pekerjaan untuk 56 juta orang²⁸ dan gizi untuk lebih banyak orang lagi - kebanyakan pekerja di negara-negara berkembang tidak merasakan manfaatnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut ditunjukkan oleh kasus udang - pangan laut yang paling banyak diperdagangkan selama beberapa dekade terakhir, di mana peringkatnya hanya turun setingkat di bawah Salmon pada tahun 2013.²⁹ Skala permintaan konsumen akan udang di negara-negara kaya sudah jelas. Orang Amerika mengonsumsi 1.8 kg (kira-kira empat pon) udang per orang setiap tahun, lebih banyak dari pangan laut lainnya.³⁰ Eropa adalah importir pangan laut terbesar di dunia, dimana udang menjadi salah satu komoditas pangan laut yang paling banyak dikonsumsi.³¹

* * *

PANGAN LAUT MERUPAKAN KOMODITAS PANGAN YANG PALING BANYAK DIPERDAGANGKAN DAN BERNILAI - SUMBER PENDAPATAN EKSPOR YANG LEBIH BESAR BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DIBANDINGKAN GABUNGAN KOMODITAS-KOMODITAS LAINNYA SEPERTI DAGING, TEMBAKAU, BERAS DAN GULA YANG MENYEDIAKAN PEKERJAAN UNTUK 56 JUTA ORANG.

* * *



Udang dan pekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Indonesia.

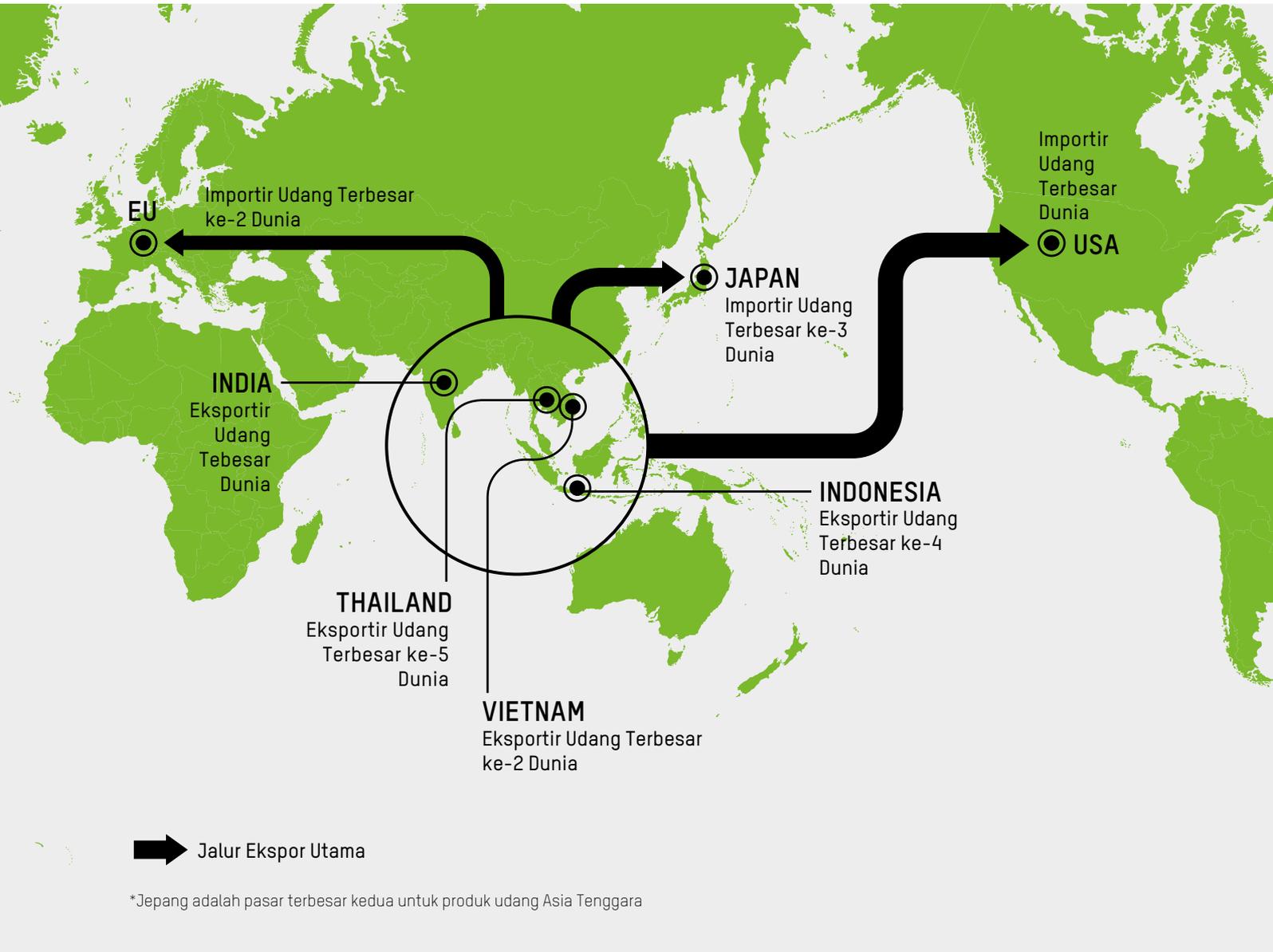
Foto: Adrian Mulya/Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia



PERKEMBANGAN RANTAI PASOK YANG PANJANG DAN RUMIT

Sebuah jaringan rantai pasok yang kompleks telah berkembang untuk memenuhi permintaan ini, kebanyakan dimulai di Asia, yang merupakan sumber dari 89% produksi udang. India, Vietnam, Ekuador, Indonesia dan Thailand merupakan eksportir terbesar di tahun 2016, dan AS, EU serta Jepang merupakan tujuan utamanya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2³².

GAMBAR 2: EKSPORTIR DAN IMPORTIR UDANG TERBESAR DI TINGKAT GLOBAL

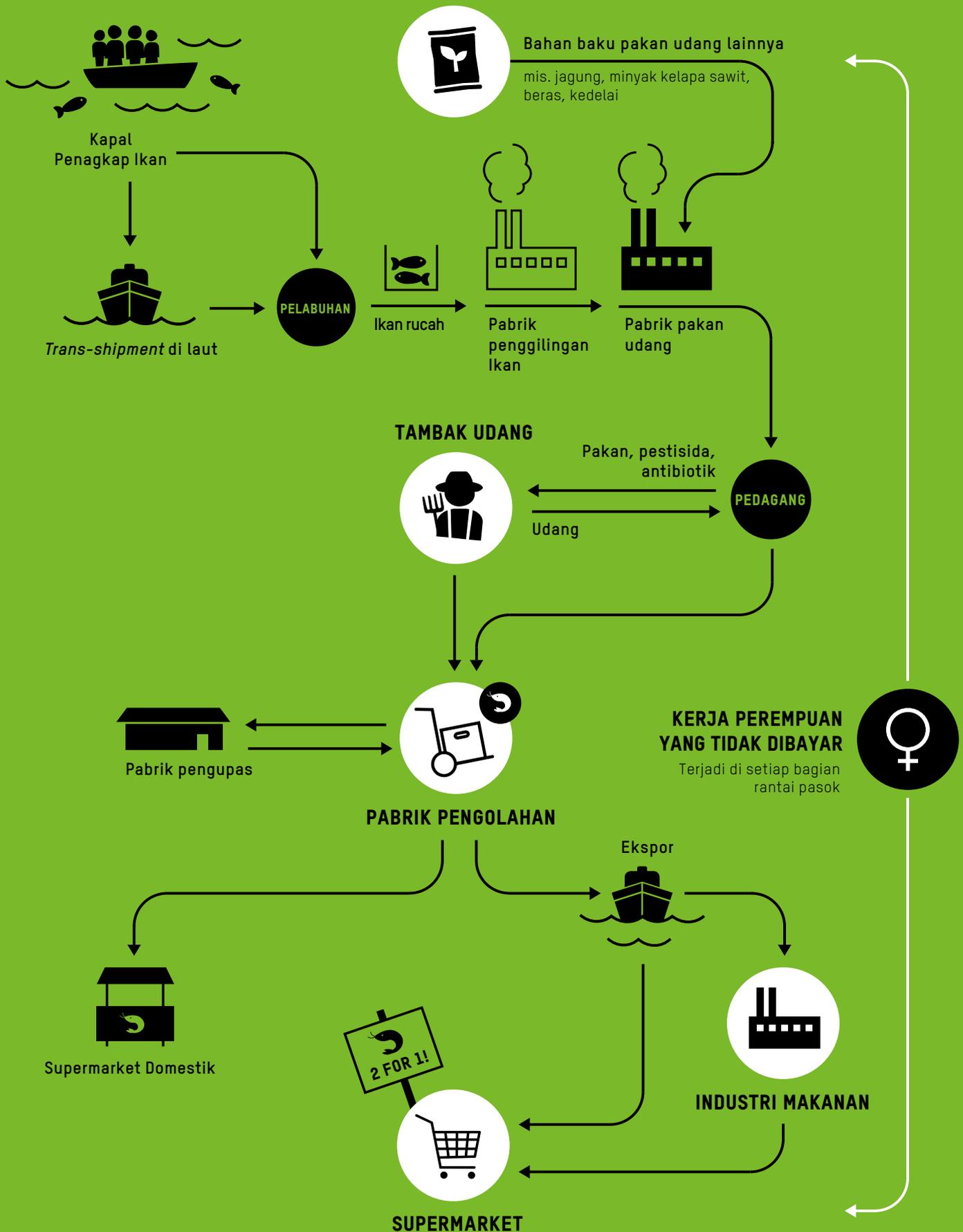


Gambar yang dibuat oleh Oxfam menggunakan data 2016 dari FAO. (2017). *Increased Production of Farmed Shrimp Leads to Improved International Trade*. Diperoleh dari: <http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/989543/>

Namun perjalanan sesungguhnya menuju rak supermarket, seperti yang digambarkan dalam Gambar 3, merupakan perjalanan yang panjang dan suram, melibatkan banyak sekali aktor. Bagi supermarket dan ritel lainnya, mengetahui siapa yang terlibat dalam memproduksi barang mereka melampaui pemasok tingkat pertama – apalagi kondisi pekerjaanya – merupakan hal yang mustahil selama bertahun-tahun.

GAMBAR 3: RANTAI NILAI UDANG YANG PANJANG DAN RUMIT

RANTAI PASOK UDANG: ASIA TENGGARA



Sumber: Gambar disusun oleh Oxfam



Gambar 3 menunjukkan, di hulu rantai pasok, kapal pukat mengumpulkan ‘ikan rucah/ *trash fish*’ – ikan berkualitas rendah, rusak atau yang masih muda³³ – yang dapat dijual untuk digiling menjadi pakan udang.

Banyak petambak udang skala kecil dan besar membudidayakan larva udang di kolam besar – menerapkan pemberian pakan, pestisida dan antibiotik – sebelum menjual hasil panen mereka biasanya melalui pedagang lokal ke perusahaan besar pengolahan udang dan pangan laut.

Di sini udang di kupas, disiapkan dan dikemas untuk pengiriman barang baik ke pasar domestik atau pasar ekspor, di mana udang-udang ini dijual segar, beku, atau sebagai bahan baku makanan olahan. Udang-udang ini dapat dijual melalui importir khusus (spesialis) atau langsung ke supermarket dan gerai ritel lainnya.

TANTANGAN ENDEMIK BAGI HAK PEKERJA

Terkubur dalam berbagai lapisan rantai pasok tersebut, pelanggaran hak buruh yang endemis telah didokumentasikan secara luas.

Di laut...

Penangkapan ikan telah dinilai oleh ILO sebagai pekerjaan paling berbahaya di seluruh dunia.³⁴ Kapal dapat ‘berlindung’ di perairan internasional, di luar pengawasan penegak hukum³⁵, sehingga pekerja sangat rentan terhadap praktik-praktik eksploitatif. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa penyelidikan tingkat tinggi telah mengekspos maraknya penggunaan kerja paksa³⁶ terutama pekerja migran di atas kapal Indonesia dan Thailand yang terkait dengan rantai pasok supermarket besar dan gerai ritel lainnya di AS dan EU³⁷.

Komisi Eropa memberi peringatan ‘kartu kuning’ kepada Thailand terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak teregulasi (*IUU fishing*) pada tahun 2015, bahkan mengancam pelarangan impor bagi seluruh produk perikanan dari Thailand kecuali jika mereka melakukan perbaikan kondisi kerja.³⁸ Dikarenakan temuan di sektor perikanan tersebut, peringkat Thailand di *US Trafficking in Persons Report* diturunkan ke tingkat paling bawah, walaupun sebagai bentuk pengakuan atas beberapa perbaikan, mereka kemudianditempatkan pada Daftar Pantauan *Tier 2*.³⁹

...dan di darat

Permasalahan tidak lantas berakhir begitu kapal perikanan mencapai pelabuhan. Bagi pekerja perempuan, di sinilah permasalahan mereka dimulai. Sebagaimana yang ditunjukkan di Gambar 4, rantai nilai udang sangat terpisah-pisah oleh garis gender⁴⁰, dimana laki-laki terpusat di aktivitas perikanan dan pertambakan, sementara perempuan banyak terlibat di pengolahan dan melakukan tugas-tugas pemeliharaan dan peran tak berayar lainnya di tambak.

Dalam banyak hal, pembagian kerja ini merupakan pergeseran tipikal kearah perekrutan yang lebih ‘fleksibel’ dan ‘terfeminisasi’⁴¹ yang banyak terjadi di sebagian besar rantai pasok makanan (lihat Bagian 2 dari laporan utama yang meluncurkan kampanye terbaru Oxfam). Para perempuan yang bekerja di pelabuhan dan pabrik pengolahan udang – adalah layaknya perempuan pemetik anggur di Afrika Selatan atau nanas di Kosta Rika – yang dicirikan oleh informalitas. Pekerjaan umumnya bersifat subkontrak; dimana jika ada kontrak maka sifatnya pasti jangka pendek, dan upah seringnya berdasarkan satuan hasil (borongan) yang mendorong kerja berlebihan.⁴²

* * *

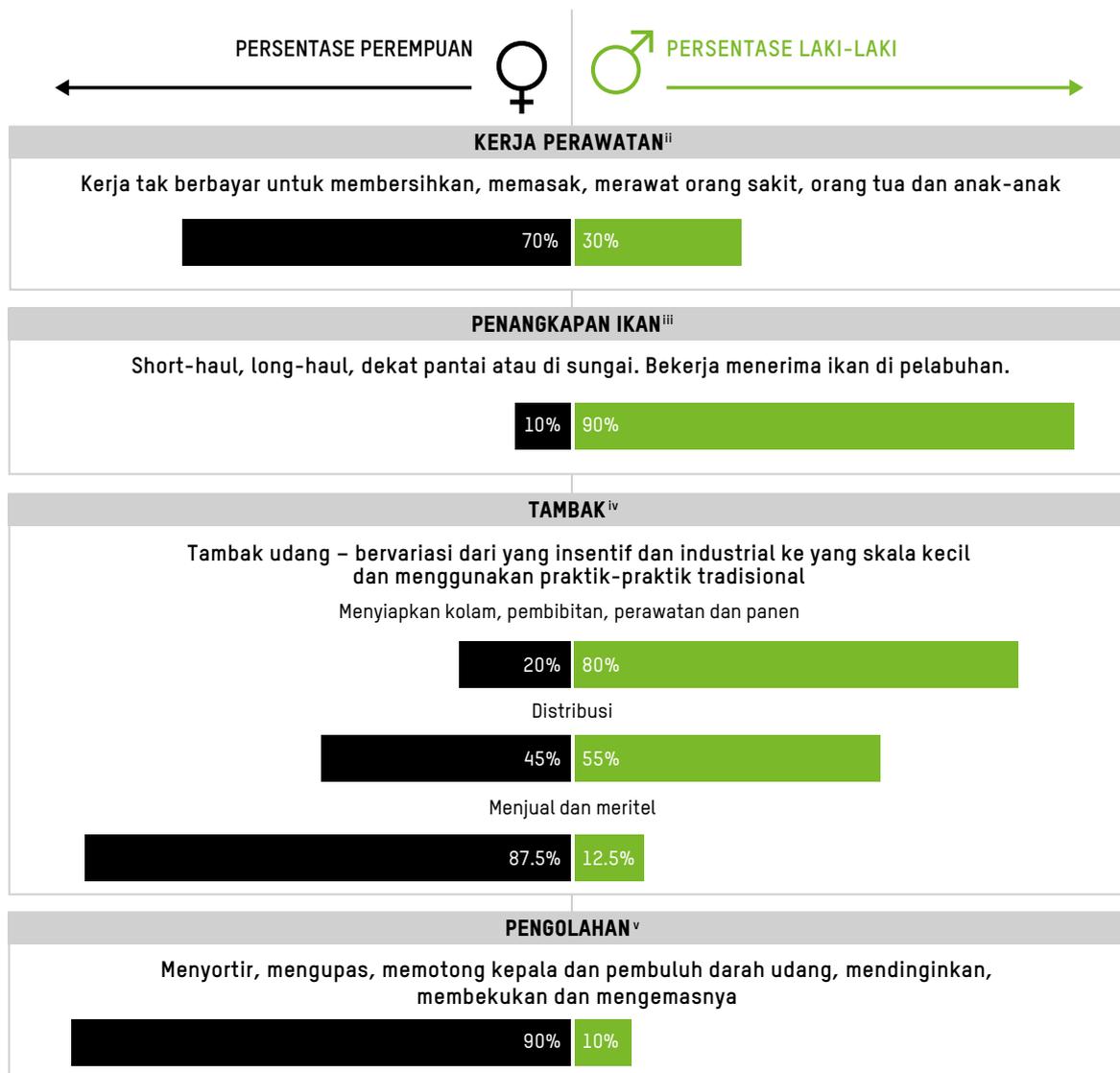
PEMBAGIAN KERJA INI ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM RANTAI NILAI PASOK UDANG MERUPAKAN PERGESERAN TIPIKAL KE ARAH PEREKRUTAN YANG LEBIH ‘FLEKSIBEL’ DAN ‘TERFEMININASI’ DALAM BANYAK KOMODITAS PANGAN, YANG DITANDAI DENGAN PENGGUNAAN PEKERJA SUBKONTRANTOR, UPAH RENDAH BERDASARKAN TARGET BORONGAN DAN JAM KERJA YANG PANJANG.

* * *

Kerja paksa juga terdokumentasi di tempat kerja yang berbasis di darat. Penyelidikan lebih lanjut di Thailand mengungkapkan bahwa kerja paksa terhadap perempuan dan laki-laki di 'lokasi pengupasan' – sifatnya informal dan tertutup, di-subkontrakkan oleh perusahaan pengolahan yang lebih besar agar biaya pekerja dapat diminimalisir – dalam rantai pasok dari supermarket utama AS dan ritel lainnya.⁴³

GAMBAR 4: RANTAI PASOK UDANG DIPISAHKAN MENURUT GARIS GENDER

Ilustrasi pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki dalam rantai nilai udang global di Asia Tenggara i



i Karena adanya kelangkaan data terpilah gender secara konsisten yang tersedia untuk wilayah tersebut, angka-angka yang diberikan telah didasarkan pada sumber sekunder yang tersedia yang mencakup berbagai negara dan temuan penelitian Oxfam sendiri di Asia Tenggara. Data-data ini juga harus dianggap murni menggambarkan jenis segregasi gender yang menandai sektor ini secara keseluruhan.

ii Berdasarkan perkiraan rata-rata untuk pembagian pekerjaan tak berbayar di dua negara di kawasan ini: Vietnam dan Kamboja, yang dapat menunjukkan tanggung jawab kerja perawatan bagi pekerja nasional dan migran masing-masing dalam rantai pasok udang. Action Aid. (2016). *Make a House Become a Home*. Hanoi: Action Aid, menemukan bahwa perempuan rata-rata melakukan sekitar 60% dari pekerjaan tak berbayar di Vietnam; dan OECD. (2014). *Gender, Institutions and Development Database 2014*, menunjukkan bahwa perempuan melakukan 80% pekerjaan perawatan tak berbayar di Kamboja.

iii Di seluruh Asia Tenggara, laki-laki mendominasi pekerjaan penangkapan ikan komersial. Misalnya, di bawah hukum Thailand, perempuan tidak diizinkan bekerja di sektor ini. Lihat ILO. (2018). *Baseline research findings on fishers and seafood workers in Thailand*. Berdasarkan temuan penelitian Oxfam di Thailand, beberapa perempuan bekerja secara informal di pelabuhan.

iv Perkiraan berdasarkan angka-angka dari sektor perikanan budidaya Thailand di: D.A.M De Silva. (2011). *Faces of women in global fishery value chains: Female involvement, impact and importance in the fisheries of developed and developing countries*. NORAD / FAO Value Chain Project.

v Perkiraan Oxfam berdasarkan temuan penelitian di Indonesia dan Thailand dan sumber-sumber sekunder termasuk: D.A.M De Silva. (2011). Op. cit.; Verité. (2016). *Research on Indicators of Forced Labour in the Supply Chain of Tuna in the Philippines*; dan C. Baga et. Al. (2010). *The Global and Local Markets of Penaeus monodon in Bohol Island, Philippines: Gender Role in HACCP Implementation*. Lihat catatan akhir untuk detail lebih lanjut.



Untuk mendapatkan upah minimum, Budi, seorang pekerja pengolah udang di Indonesia, harus mengupas hingga 950 ekor udang dalam waktu satu jam. Demi memenuhi target, dia harus memotong waktu istirahatnya hanya untuk makan dan tidak ke toilet. Dia akan berdiri selama sembilan jam selama giliran kerjanya.

Foto: Adrian Mulya / Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia



TANDA-TANDA KEMAJUAN

Setelah berbagai kasus ini mendapat perhatian internasional, baik pemerintah di wilayah dan pelaku sektor swasta telah memperkenalkan sejumlah inisiatif baru, beberapa di antaranya dijelaskan dalam Kotak 1 dan 2. Hal ini menunjukkan kesadaran yang semakin besar akan tantangan hak-hak pekerja di sektor ini, beberapa manfaat penting bagi para pekerja mulai terlihat.

KOTAK 1: REFORMASI OLEH PEMERINTAH THAILAND

- Pemerintah memperkenalkan Peraturan Menteri 2014 untuk Melindungi Pekerja dalam bidang Perikanan Laut, Undang-undang Perikanan 2015 dan Ordonansi Kerajaan 2018 tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Asing. Koordinasi antara instansi dan departemen terkait telah diperbaiki.
- Sebuah Pusat Komando untuk Memerangi *Illegal Fishing* / Penangkapan ikan secara ilegal (*A Command Centre to Combat Illegal Fishing - CCCIF*) telah dibentuk, yang memperkenalkan pendekatan yang berpusat pada korban kepada para petugas Angkatan Laut yang mungkin bertemu dengan pekerja migran. Pusat komando ini juga meluncurkan sebuah sistem verifikasi yang menggunakan tangkapan elektronik - di 32 pusat kontrol pelabuhan dan sistem pengawasan kapal pada 6.500 kapal untuk meningkatkan ketertelusuran (*traceability*).
- Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat komitmen yang signifikan untuk melindungi kesejahteraan pekerja, terlepas dari status hukum mereka, dengan meningkatkan koordinasi dengan LSM lokal untuk melakukannya. Seorang perwakilan dari kementerian mengatakan kepada Oxfam bahwa, 'perlindungan terhadap pekerja migran hanya dapat berjalan apabila pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipil, karena mereka tahu tantangan pekerja migran'. Investasi yang signifikan untuk penerjemah akan sangat membantu dalam memecahkan hambatan terhadap bahasa.

ILO mencatat beberapa perbaikan signifikan:

- Proporsi pekerja yang menerima kontrak tertulis telah meningkat dari sekitar 6% pada tahun 2013 menjadi 43% pada tahun 2017. Namun, beberapa yang masih memiliki salinan kontrak mereka, memiliki kontrak yang disajikan dalam bahasa mereka sendiri, atau sadar akan pilihan mereka jika ada ketentuan yang bermasalah.
- Upah juga meningkat, dari sekitar THB 6,500 (\$203) per bulan pada tahun 2013 menjadi THB 9,900 (\$310) per bulan, sebelum pengurangan, di tahun 2017. Namun, pemotongan upah, penahanan upah dan lembur yang berlebihan tetap menjadi hal yang rutin.
- Sejak reformasi, insiden terkait dengan pekerja anak tampaknya telah menurun menjadi kurang dari 1%.

Hasil dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk survei Pangan Laut yang Etis dan Berkelanjutan juga menunjukkan kemajuan dengan menghormati regularisasi pekerja di bidang perikanan:

- 62% responden dari 300 pekerja industri perikanan Thailand yang disurvei melaporkan bahwa mereka memegang paspor atau sertifikat identitas – sebuah peningkatan yang signifikan apabila dibandingkan dengan survei sebelumnya.

“PERINGATAN DARI UNI EROPA MERUPAKAN SEBUAH PANGGILAN YANG MEMBANGUNKAN KITA BAHWA KITA MEMILIKI MASALAH DAN KITA AKAN BERUSAHA MEMPERBAIKI MASALAHNYA, TUJUANNYA BUKAN SEKEDAR UNTUK MENGHENTIKAN (PERINGATAN) KARTU KUNING TETAPI UNTUK MEMPERBAIKI SELURUH SEKTOR PERIKANAN, UNTUK MEMBUATNYA BERKELANJUTAN.”

Dr Adisorn Promthep,
Departemen Perikanan di
Thailand



KOTAK 2: REFORMASI OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berada di garis depan untuk membuat Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) menjadi kenyataan. Indonesia memiliki mandat sertifikasi hak asasi manusia dalam industri pangan laut, bahkan melebihi panduan yang dimiliki oleh UNGP. Peraturan Menteri mengenai Ketentuan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Perikanan yang ditandatangani pada tahun 2015, mengharuskan kapal untuk memiliki kebijakan hak asasi manusia, sarana uji tuntas dan sistem remediasi untuk kasus-kasus pelanggaran. Mekanisme sertifikasi – yang melibatkan laporan rinci tentang upah buruh, kontrak, kebebasan dari paksaan dan kondisi lainnya – diluncurkan pada tahun 2017.
- Program pemberantasan *IUU Fishing*, termasuk diantaranya sebuah Moratorium terhadap Kapal Asing, telah ditetapkan, dan Satuan Tugas untuk Mencegah dan Memberantas *IUU Fishing* juga terbentuk.
- Ratifikasi Konvensi Buruh Maritim 2006 merupakan langkah signifikan yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi para pekerja di kapal Indonesia setelah kasus Benjina⁴⁵. Namun, kapasitas untuk inspeksi tenaga kerja masih terbatas dan upaya yang bersifat lintas kementerian diperlukan untuk memastikan hukum telah diimplementasikan sepenuhnya.
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menunjukkan keprihatinannya terkait dengan pengurangan jumlah serikat pekerja pada tahun 2017, sebanyak 50% dari sekitar 14.000 serikat pekerja menjadi 7.000 serikat pekerja. Melalui kementeriannya, Menteri mendorong semua pekerja untuk memiliki kebebasan berserikat, tidak hanya bagi pekerja yang bekerja di perusahaan negara.



Udang di Tempat Pelelangan Ikan di Indonesia.

Foto: Adrian Mulya/Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia

‘KITA TIDAK MAU APA YANG TERJADI DI BENJINA AKAN TERULANG LAGI. PARA PEKERJA PERLU PENGAKUAN SECARA HUKUM DAN HAM. MEREKA JUGA SAMA SEPERTI PEKERJA DI INDUSTRI LAIN DI DUNIA INI,’

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 25 Januari 2017 ⁴⁴

“DALAM KONTEKS INDONESIA, SALAH SATU SOLUSINYA YA PERKUAT SAJA PERANAN PENGAWAS TENAGA KERJA. KASIH MEREKA KEWENANGAN DAN KAPASITAS UNTUK MENSUPERVISI PROSES PENGGUNAAN TENAGA KERJA DI KAPAL IKAN TERMASUK MASUK KE LOKASI KERJA DI KAPAL. LALU, PERKUAT KERJA SAMA LINTAS SEKTORAL DAN KERJA SAMA ANTAR NEGARA, TERUTAMA DI KAWANAN”

Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, 27 Maret 2018 ⁴⁶

KOTAK 3: INISIATIF SEKTOR SWASTA

- Pada 2016, **Thai Frozen Foods Association / Asosiasi Makanan Beku Thailand** membuat langkah progresif untuk melarang penggunaan gudang pengupasan untuk barang-barang ekspor. Meskipun hal ini membuat ribuan pekerja migran kehilangan pekerjaan, sejumlah perusahaan pengolahan besar, dengan didorong oleh beberapa supermarket, telah mempekerjakan mereka kembali. Namun, laporan media menemukan bahwa gudang pengupasan masih tetap digunakan, termasuk untuk ekspor.⁴⁷
- **Thai Union / Serikat Thailand**, sebuah eksportir pangan laut Thailand terkemuka, yang bermitra dengan Nestle dan Verité untuk meluncurkan perahu 'demonstrasi' guna menunjukkan seperti apa kondisi kerja yang layak di kapal;⁴⁸ telah mengadopsi kebijakan yang melarang pengiriman antar barang di atas laut (yang memungkinkan kapal untuk menghindari pengawasan hukum);⁴⁹ telah membentuk komite kesejahteraan pekerja dan pelatihan hak pekerja di fasilitas pengolahan, serta bekerja bersama dengan Jaringan Hak Pekerja Migran (*the Migrant Workers' Rights Network*);⁵⁰ telah beralih ke pembayaran elektronik untuk pekerja;⁵¹ telah berhenti menggunakan 'gudang pengupasan' sub-kontrak; telah mengumumkan biaya perekrutan pekerja nol rupiah dan kebijakan baru berupa perekrutan langsung;⁵² dan menerbitkan pernyataan komprehensif di bawah Undang-Undang Perbudakan Modern di Inggris.⁵³
- **CP Foods**, eksportir Thailand terkemuka lainnya, juga meningkatkan ketertelusuran dan penggantian biaya perekrutan untuk para migran yang secara langsung mereka pekerjakan.⁵⁴ Mereka juga telah menyiapkan sebuah *hotline* pihak ketiga yang netral untuk karyawan melalui LSM Jaringan Promosi Hak Buruh (LPN),⁵⁵ meskipun saat ini belum terlihat jika para pekerja akan cukup percaya untuk menggunakannya.
- Eksportir terkemuka Thailand lainnya, **Seafresh**, mengirim staf ke negara-negara perekrutan untuk menginformasikan kepada para kandidat tentang kondisi kerja di *Seafresh* sebelum mereka menandatangani kontrak kerja mereka, yang disediakan dalam bahasa para migran itu sendiri. Perusahaan bekerja sama dengan Institute Issara untuk menginformasikan kandidat tentang hak mereka dan tentang akses terhadap dukungan independen di Thailand, serta mengadakan kegiatan orientasi saat tiba di Thailand di mana aturan dan ketentuan khusus dijelaskan dalam bahasa pekerja sendiri.
- **Nestlé** mengungkapkan sebuah penilaian dari pihak ketiga yang menemukan praktik kerja paksa dalam rantai pasok udangnya.⁵⁶
- **Tesco** telah melakukan uji tuntas terkait hak asasi manusia pada seluruh rantai pasok pangan lautnya⁵⁷, dengan terlibat dengan Federasi Pekerja Transportasi Internasional (ITF) dan juga bekerja dengan perusahaan lain untuk mengembangkan Aliansi Aksi terkait Etika Pangan laut sebagai sebuah forum untuk tindakan sebelum persaingan, termasuk mendukung Konvensi ILO tentang Pekerjaan di Sektor Perikanan. Lebih dari 50% pangan laut Tesco sekarang berasal dari produk sampingan industri tuna (IFFO⁵⁸-certified).
- **Plus** telah berkomitmen untuk hanya menyediakan pangan laut bersertifikat *Marine Stewardship Council* (MSC) atau *Aquaculture Stewardship Council* (ASC) – di Belanda sekitar 65% dari semua produk pangan laut memiliki label ASC atau MSC pada tahun 2017⁵⁹ – dan AEON serta Sainsbury's memiliki target untuk melakukannya pada tahun 2020, meskipun kedua skema tersebut memiliki batasan dalam hal hak-hak pekerja (lihat Kotak 4).⁶⁰



- **Institute Issara** telah bekerjasama dengan sejumlah pengecer, produsen dan eksportir untuk mengembangkan sebuah pendekatan terkait Pemantauan Ketenagakerjaan Inklusif⁶¹ sebagai alternatif untuk audit standar sosial. Pendekatan ini didasarkan pada pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi kerja yang dibentuk berdasarkan masukan dari pekerja melalui saluran telepon 24 jam, serta wawancara terhadap para ahli, wawancara terhadap manajemen, kunjungan masyarakat dan penilaian risiko di tempat kerja.
- Sejak tahun 2016, **Leadership Group for Responsible Recruitment / Kelompok Kepemimpinan untuk Rekrutmen yang Bertanggung Jawab**, sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa merek internasional termasuk Mars, Marks & Spencer, Tesco, Unilever dan Walmart, yang diselenggarakan oleh Institut Hak Asasi Manusia dan Bisnis, telah bekerja sama untuk mengatasi masalah tentang bagaimana pekerja migran direkrut dan khususnya praktik umum dimana pekerja harus membayar biaya perekrutan untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Bercermin pada Prinsip-Prinsip Dhaka terkait Migrasi dengan Martabat (dan berdasarkan standar internasional), Prinsip Pembayaran oleh para Pemberi Pekerjaan adalah sebuah komitmen untuk memastikan bahwa tidak ada pekerja yang harus membayar untuk sebuah pekerjaan dan bahwa biaya perekrutan harus ditanggung, bukan oleh pekerja, tetapi oleh pemberi pekerjaan.⁶²
- **The Seafood Task Force / Satuan Tugas Pangan laut** adalah sebuah aliansi industri internasional yang terdiri dari pengecer dan produsen yang ingin berkolaborasi dalam menangani isu-isu sosial dan lingkungan yang terkait dengan *IUU Fishing*, termasuk melalui peningkatan penelusuran, pengembangan Kode Etik industri dan mendiskusikan masalah-masalah seperti biaya rekrutmen.⁶³ Anggota termasuk diantaranya adalah sejumlah supermarket Eropa dan pengecer (termasuk Ahold Delhaize, Aldi AS, Costco, Morrisons, Safeway, Target, dan Walmart), eksportir utama pangan laut Thailand (termasuk CP Foods, Marine Gold, Seafresh, the Thai Royal Frozen Association, dan Thai Union) serta berbagai importir dan produsen pangan laut lainnya. Berbagai pertemuan yang dilakukan oleh satuan tugas tersebut menunjukkan kesadaran yang semakin besar akan lingkup masalah sosial dan lingkungan di sektor ini. Namun, keanggotaan bersifat sukarela, sehingga hasil nyata seringkali masih tidak jelas, dan keterlibatan LSM dan pekerja, walaupun sangat dihargai, masih sangat terbatas.⁶⁴ Anggota LSM yang tergabung dalam Kelompok Penasihat Pemangku Kepentingan Eksternal harus menandatangani perjanjian kerahasiaan, hal ini sangat membatasi kapasitas mereka untuk bertindak sebagai pengawas industri yang efektif, dan memimpin banyak pemangku kepentingan untuk membentuk Koalisi CSO eksternal (lihat Kotak 7).
- Sebuah proyek percontohan untuk keterelusuran yakni **Blockchain** – yang menggunakan teknologi di balik Bitcoin – telah melacak tuna ‘dari kapal ke piring’ antara Indonesia dan Inggris, dengan potensi untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasok secara radikal. Informasi yang didapat tidak diedit dan terkode, dimana nelayan dan produsen lain sepanjang rantai pasok mengirimkan SMS untuk mendaftarkan tangkapannya dan mencatat pergerakan serta pengolahan selanjutnya.⁶⁵



Seorang pekerja kapal perikanan di Thailand menunjukkan tangannya yang dipenuhi sisik ikan.

Foto: Suthep Kritsanavarin/Oxfam

KOTAK 4: APAKAH SERTIFIKASI MEMBANTU?

Pada tahun 2016, pangan laut bersertifikat – yaitu label pangan laut seperti MSC, *Friends of the Sea*, ASC atau *Best Aquaculture Practices* – menyumbang 14% dari total penjualan pangan laut, dengan nilai sebesar 11,5 miliar USD. Pertumbuhan penjualan pangan laut secara global yang bersertifikat dalam dekade terakhir telah sangat spektakuler, bertumbuh 10 kali lebih cepat daripada pangan laut konvensional. ASC telah mencapai tingkat pertumbuhan hingga 98% per tahun antara 2012 -2015, sebagian besar berkat komitmen baru dari supermarket Eropa dan AS seperti Aldi North, Lidl, dan Walmart untuk menghasilkan pangan laut bersertifikat.⁶⁶

Meskipun peningkatan penjualan yang besar menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi untuk mengadopsi praktik-praktik baru dengan cepat, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sampai sertifikasi pangan laut dapat menjamin pekerjaan yang layak dan menghormati hak asasi manusia, serta kesepakatan yang adil bagi petani dan kelestarian lingkungan. Yang menjadi perhatian khusus adalah kurangnya penanganan yang memadai atas isu-isu sosial, seperti hak pekerja dan petani, yang bertentangan dengan masalah lingkungan seperti penangkapan ikan berlebihan.

Walaupun standar ASC jauh lebih baik daripada MSC dalam hal ini⁶⁷, masih terdapat kekurangan. Standar sosial hanya dinilai berkaitan dengan kegiatan di tingkat petani/petambak – dengan demikian, tidak termasuk masalah hak pekerja di pabrik pengolahan atau dalam produksi tepung ikan. Standar ASC juga tetap tidak dapat diakses oleh produsen skala kecil, yang hanya menikmati perwakilan terbatas dalam skema tata kelola pengaturan, dan menawarkan sedikit ruang untuk memastikan bahwa mereka dapat mengambil manfaat dari meningkatnya harga konsumen akhir dalam rantai pasok.⁶⁸



Awak kapal membongkar ikan dari kapal mereka di dermaga di Thailand.

Foto: Suthep Kritsanavarin/Oxfam



Diya, ibu dengan enam orang anak dan keluarganya sudah berada di Thailand selama sekitar 10 tahun. Suami Diya bekerja di pabrik pengalengan ikan dan salah satu putranya bekerja di kapal. Tetapi seiring berjalannya waktu, keluarga mereka mengalami penumpukan utang dan sekarang berutang sekitar 30.000 Baht (Thailand) per bulan yang adalah bunga saja. Beberapa beban utang Diya adalah karena membayar biaya untuk mendapatkan pekerjaan.

Foto: Suthep Kritsanavarin/Oxfam

2. BUKTI BARU DARI TANTANGAN YANG BELUM SELESAI

Terlepas dari kemajuan yang terjadi baru-baru ini – dijelaskan lebih jauh dalam Bagian 1 – penelitian terbaru dari Oxfam, Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia⁶⁹ dan lainnya – termasuk Organisasi Buruh Internasional (ILO)⁷⁰, *Human Rights Watch* (HRW)⁷¹ dan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pangan laut yang Etis dan Berkelanjutan (Koalisi CSO)⁷² – yang dilakukan sepanjang tahun menunjukkan bahwa masalah serius tetap ada.

Banyak supermarket besar di AS dan Eropa yang mendapatkan sumber dari daerah yang masih memiliki masalah seputar pemenuhan hak-hak para pekerjanya. Kotak 5 menjelaskan temuan wawancara di Thailand dengan pekerja di kapal penangkap ikan, dan Kotak 6 menggambarkan temuan wawancara di Indonesia dan Thailand dengan pekerja di pabrik pengolahan udang. Nama mereka telah diubah untuk melindungi identitas mereka.

KOTAK 5: KERJA PAKSA TERUS BERLANJUT DI KAPAL PENANGKAP IKAN THAILAND YANG KEMUNGKINAN MEMASOK SUPERMARKET KE AS DAN EROPA

Tahun 2017, Peneliti Oxfam berbicara dengan 19 pekerja migran laki-laki di Thailand tentang pengalaman mereka di kapal penangkap ikan dan di pelabuhan. Metodologi penelitian dan batasan dijelaskan dalam Lampiran 1.⁷³

Para pekerja melaporkan contoh praktik ketenagakerjaan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kerja paksa sesuai dengan indikator operasional dan pedoman yang dikembangkan oleh ILO,⁷⁴ dan pelanggaran hak asasi manusia dan buruh yang mengerikan, termasuk proses perekrutan berbasis biaya, penipuan terkait dengan upah dan kondisi kerja, pemotongan gaji, penahanan dokumen identitas, lembur yang berlebihan, dan penganiayaan fisik dan verbal. Beberapa contoh dari temuan penelitian dapat dilihat seperti di bawah ini.

Proses perekrutan berbasis biaya

- Meskipun jalur hukum bagi pekerja untuk memasuki wilayah Thailand telah membaik, sebagian besar pekerja yang diwawancarai oleh Oxfam menjelaskan bahwa mereka bermigrasi tanpa terdokumentasi, kadang-kadang melakukan perjalanan dalam kondisi sulit, berbahaya dan merendahkan. Pekerja menggambarkan bahwa mereka membayar calo dari THB 2.000 hingga 15.000 (\$60-450) untuk biaya transportasi, dengan pembayaran pada umumnya dalam kisaran THB 4.000 hingga 6.000 (\$120-180), dan antara THB 4.000 dan 8.000 (\$120-240) sebagai biaya untuk mendapatkan pekerjaan di kapal penangkap ikan, di pelabuhan dan di beberapa pabrik. Sebagai perbandingan, banyak pekerja pengolahan pangan laut (lihat Kotak 6) yang bermigrasi melalui jalur formal, yang melaporkan membayar jauh lebih banyak: hingga THB 50.000 (\$1.460) dalam beberapa kasus.
- Seringkali biaya tersebut dibiayai melalui uang muka atau pinjaman dari broker atau pengusaha yang kemudian dilunasi melalui pemotongan dari penghasilan pekerja yang memang sudah sangat rendah, menempatkan mereka pada posisi jeratan hutang yang sangat membatasi kebebasan mereka untuk meninggalkan majikan mereka.

Penipuan sehubungan dengan upah

- Beberapa nelayan Myanmar dalam situasi kerja paksa melaporkan bahwa, meskipun yang dijanjikan THB 9000 (\$270) per bulan, mereka menerima pembayaran bulanan yang tidak teratur antara THB 1.500 dan 6.000 (\$45-180) – hanya \$1,5-6 per hari – tanpa penjelasan. Ketika salah satu dari nelayan tersebut mengatakan kepada majikannya bahwa dia tidak bisa menghidupi keluarganya, majikan tersebut malah menampar wajahnya.

Jam kerja yang berlebihan

- Jam kerja yang panjang dan penipuan mengenai gaji merupakan keluhan utama di Asia Tenggara. Ketika tangkapan besar atau ketika jaring perlu diperbaiki, nelayan di kapal Thailand dilaporkan bekerja tanpa tidur – dan tidak mendapat uang lembur – selama beberapa hari. Bekerja empat belas jam per hari merupakan hal yang lazim⁷⁵, dan banyak lagi yang melaporkan berada di laut selama 27 atau 28 hari dalam sebulan.

* * *

**PEKERJA
MENGGAMBARKAN
BAHWA MEREKA
MEMBAYAR CALO DARI
THB 2.000 HINGGA
15.000 (\$60-450) UNTUK
BIAYA TRANSPORTASI,
DAN ANTARA THB 4.000
DAN 8.000 (\$120-
240) SEBAGAI BIAYA
UNTUK MENDAPATKAN
PEKERJAAN DI KAPAL
PENANGKAP IKAN, DI
PELABUHAN DAN DI
BEBERAPA PABRIK.**

* * *

* * *

**BEBERAPA NELAYAN
MYANMAR MELAPORKAN
BAHWA, MEREKA
MENERIMA PEMBAYARAN
BULANAN YANG TIDAK
TERATUR ANTARA THB
1.500 DAN 6.000 (\$45-
180) – HANYA \$1,5-6
PER HARI.**

* * *



Pemotongan gaji dan penyimpanan dokumen identitas

- Chhay, 50-tahun-migran asal Kamboja di Thailand, mengatakan kepada Oxfam bahwa setelah upahnya tidak dibayar selama empat bulan, ia memberitahu majikannya bahwa ia ingin berhenti dan pindah kerja, karenanya dia membutuhkan identitas dan dokumen imigrasinya. Majikannya mengatakan ia hanya akan mengembalikan dokumennya jika Chhay melunasi utang yang dibuatnya sendiri yaitu sebesar THB 2.500 (\$75).

Kekerasan fisik dan kondisi kerja yang berbahaya

- Aung Kyi, 51-tahun-migran asal Myanmar untuk Thailand, menceritakan bahwa saat merapat ke pelabuhan, ia dipukuli oleh ABK dengan stik golf yang membuat tengkoraknya penyok di beberapa tempat dan menyebabkan lengan kanannya keseleo. Kapten kemudian berlayar ke laut dengan kapal tersebut selama tiga hari, menjebaknya di atas kapal tanpa perawatan medis yang sangat dibutuhkan. Pekerja lain menggambarkan kondisi kerja yang berbahaya di atas kapal, dan risiko cedera diri yang tinggi, termasuk kehilangan anggota badan.



Duong bekerja sebagai pekerja kapal di Thailand dengan gaji bulanan sebesar 10.000 Baht, atau sekitar \$301. Dia diberitahu bahwa pemilik kapal akan menanggung setengah biaya paspor (total biaya sekitar \$500), sementara sisanya akan dipotong dari gajinya dengan potongan sebesar 1.000 Baht per bulan (sekitar \$30) – beban yang sekarang menjadi semakin sulit untuk ditanggung karena kakinya terluka parah dalam kecelakaan di atas kapal.

Foto: Suthep Kritsanavarin/Oxfam

“SATU JARI KAKI SAYA PUTUS SAAT BEKERJA DI KAPAL. PADA SAAT ITU SAYA MEMBAWA WADAH BESAR DARI RUANG FREEZER, LALU TIBA-TIBA ANGIN KENCANG MENUTUP PINTU DAN MENGHANTAM SALAH SATU JARI KAKI SAYA. BEKERJA DI KAPAL MEMANG SANGAT BERISIKO. SAYA KIRA TIDAK ADA UPAYA YANG CUKUP UNTUK MEMASTIKAN KESELAMATAN DI ATAS KAPAL”

Duong, pekerja kapal ikan di Thailand

Kerawanan pangan

- Nelayan menceritakan bahwa mereka kelaparan di laut, misalnya saat kapal berlayar selama lima hari dengan membawa makanan yang hanya cukup untuk tiga hari. Berdasarkan survei Oxfam yang digunakan untuk menilai kerawanan pangan, 14 dari 16 responden diklasifikasikan mengalami kerawanan pangan yang sangat parah.⁷⁶ Hal ini berarti mereka sering mengurangi porsi atau jatah makanan dan/atau kehabisan makanan, tidur dalam kondisi lapar, atau bekerja seharian tanpa makan.

Banyak dari kondisi ini yang juga diakui oleh para pekerja yang diwawancarai Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia di pelabuhan di Indonesia di mana tuna dan hasil tangkapan laut lainnya diekspor ke pasar-pasar Jepang, Amerika Serikat dan Eropa. Pekerja melaporkan bahwa biasanya mereka tidak memiliki kontrak atau tidak resmi, dimana syarat-syarat perekrutan banyak yang tidak jelas. Banyak yang melaporkan jam kerja yang berlebihan sepanjang waktu. Upah yang dibayar dilaporkan berada di bawah tingkat Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta, dengan pembayaran bonus yang sepenuhnya tergantung pada kebijaksanaan kapten dan digunakan sebagai sarana menegakkan disiplin.⁷⁷



Koneksi supermarket

Temuan ini, bersama-sama dengan bukti terbaru yang diterbitkan oleh ILO, HRW dan Koalisi CSO, menunjukkan bahwa setiap supermarket yang mendapatkan udang atau pangan laut lainnya dari wilayah ini masih memiliki pertanyaan yang harus dijawab terkait kondisi pekerja perikanan di balik produk yang mereka jual.

Meskipun ketertelusuran produk ke masing-masing kapal perikanan sulit dilacak, beban pembuktian tetap berada di tangan supermarket untuk menunjukkan kepada seluruh pemangku kepentingannya bahwa rantai pasok mereka bebas dari eksploitasi kerja yang disebutkan di atas, dan apabila mereka terbukti melakukan eksploitasi semacam itu, mereka harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengatasinya.

KOTAK 6: PEKERJAAN BERBAHAYA, UPAH RENDAH DAN KONDISI YANG MERENDAHKAN BAGI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DI PABRIK PENGOLAHAN UDANG INDONESIA DAN THAILAND

Di tahun 2017, Peneliti Oxfam dan Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia juga melakukan wawancara tatap muka terhadap lebih dari 100 pekerja perempuan di beberapa eksportir udang dan pangan laut terbesar dari Thailand dan Indonesia, yang beberapa diantaranya memasok atau pernah memasok ke berbagai supermarket terbesar di Jerman, Inggris, Belanda dan AS – seperti yang dijelaskan di bawah ini.⁷⁸ Metodologi penelitian dan cakupannya dijelaskan dalam Lampiran 1.⁷⁹

Studi yang dilakukan di kedua negara tersebut menemukan sejumlah masalah umum, seperti pekerjaan sub-kontrak dan kontrak informal atau sementara; upah rendah, biasanya berdasarkan besaran upah borongan, dan jam kerja yang berlebihan; kondisi kerja yang tidak aman, tidak sehat dan merendahkan; dan/atau diskriminasi gender. Sementara itu, beberapa eksportir yang pekerjanya diwawancarai mengakui kepada Oxfam bahwa tidak semua praktek yang dijelaskan terjadi dalam operasi atau rantai pasok mereka, banyak praktek-praktek khusus yang dilakukan oleh para pemasok di supermarket di seluruh dunia dan biasanya dilakukan sebagai usaha untuk menekan biaya tenaga kerja dan/atau memenuhi perubahan permintaan jangka pendek.⁸⁰ Beberapa contoh temuan dijelaskan di bawah ini.

Biaya rekrutmen, pekerjaan sub-kontrak dan tidak tetap

- Pekerja migran di pabrik pengolahan pangan laut Thailand juga menggambarkan adanya praktik pembayaran biaya perekrutan yang kemudian dikurangi dari upah – sebuah situasi yang dapat berujung pada jeratan utang.⁸¹ Beberapa melaporkan membayar utang mereka melalui pemotongan gaji sekitar THB 1.000 (\$30) per bulan – pengurangan sekitar 15% dari upah, dan restriksi yang kuat terhadap kesempatan bagi mereka untuk mengubah majikan. Satu orang memberi tahu kepada Oxfam bahwa ia membayar \$150 untuk biaya perekrutan demi mendapatkan pekerjaan di pabrik pengolahan pangan laut, tetapi pada tahun pertamanya menghadapi pemotongan sebesar THB 18.000 (\$529) untuk menutup biaya perjalanannya.
- Di Indonesia, beberapa orang yang diwawancarai mengaku terdapat satu pabrik pengolahan, dimana ribuan pekerja – 80-90% di antaranya perempuan – dikontrak melalui perusahaan-perusahaan *outsourcing*, yang tentu saja membatasi tanggung jawab perusahaan kepada para pekerja dan secara langsung telah melanggar hukum Indonesia tentang *outsourcing*.⁸² Risiko yang signifikan

“MEREKA HANYA MENYERAHKAN KERTAS (DOKUMEN) DAN SAYA DIMINTA LANGSUNG MENANDATANGANNYA. SAYA TIDAK TAHU ISINYA APA. SETELAH DUA BULAN BEKERJA, SAYA BARU SADAR KALAU ITU ADALAH KONTRAK ... SUDAH TERLAMBAT BAGI SAYA. JIKA SAYA TAHU DARI AWAL, SAYA TIDAK AKAN MENANDATANGANI KONTRAK DAN HIDUP SAYA TIDAK AKAN BERADA DALAM SITUASI INI.”

Prak, pekerja pengolahan di Thailand

“PARA PEKERJA DIMINTAI UNTUK BERKUMPUL BERDASARKAN PERUSAHAAN *OUTSOURCING* Masing-masing. DAFTAR NAMA DIUMUMKAN DI SETIAP PAPAN PERUSAHAAN *OUTSOURCING*. PARA PEKERJA LALU MENERIMA DUA AMPLOP. SATU AMPLOP BERISI UPAH BULANAN MEREKA SEMENTARA YANG KEDUA ADALAH SURAT PENGUNDURAN DIRI.”

Charles, pekerja pengolah udang di Indonesia



terhadap pekerja perempuan menjadi nyata ketika sebanyak 12.500 pekerja dilaporkan dipecat pada akhir 2016 dan mulai tahun 2017, hampir semuanya diberhentikan tanpa pemberitahuan atau pesangon, termasuk pekerja yang sudah bekerja selama bertahun-tahun di perusahaan tersebut⁸³. Para pekerja melaporkan mereka diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri palsu, yang menyatakan bahwa mereka telah mengundurkan diri secara sukarela.

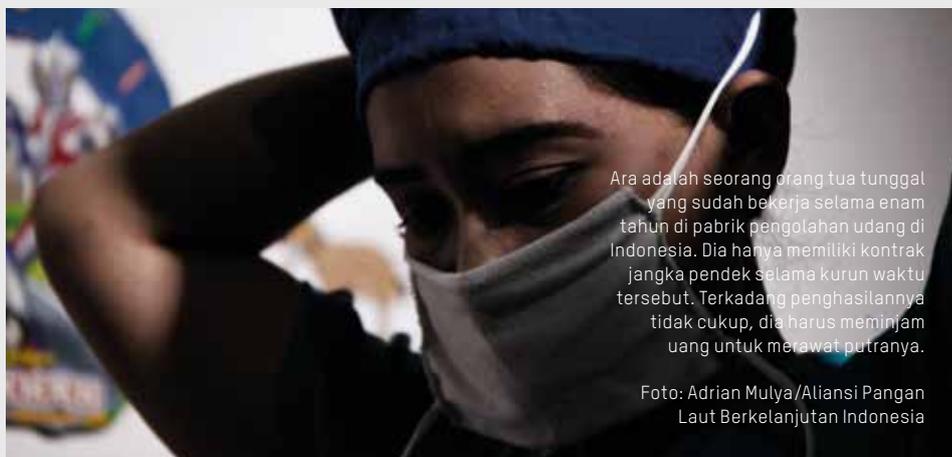
* * *

“SAYA BEKERJA DI PABRIK PENGUPASAN UDANG. [...] SAYA HARUS MEMBAYAR BROKER (AGEN). KAMI MENYICIL PINJAMAN KEPADA BROKER (AGEN) TERSEBUT KETIKA MENERIMA GAJI. TAPI KAMI TETAP HARUS MEMBAYAR BUNGANYA JUGA. SAYA HANYA MENGUPAS UDANG. SEPANJANG HARI. SAYA SERING KELELAHAN SETELAH SELESAI KERJA.”

* * *

Cho Cho, pekerja pengolahan udang di Thailand

- Para responden yang diwawancara juga melaporkan bahwa perusahaan pengolahan lain secara sistematis menempatkan pekerja mereka dalam sebuah rangkaian kontrak kerja jangka pendek masing-masing setiap dua bulan, yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan Indonesia,⁸⁴ hal ini menempatkan pekerja dalam posisi yang sangat rentan, mereka sangat sadar bahwa mereka dapat kehilangan pekerjaan mereka kapan saja. Dengan kontrak sementara semacam itu, perempuan tidak memperoleh haknya untuk bergabung dengan serikat pekerja dan kehilangan akses terhadap tunjangan seperti pesangon.



Ara adalah seorang orang tua tunggal yang sudah bekerja selama enam tahun di pabrik pengolahan udang di Indonesia. Dia hanya memiliki kontrak jangka pendek selama kurun waktu tersebut. Terkadang penghasilannya tidak cukup, dia harus meminjam uang untuk merawat putranya.

Foto: Adrian Mulya/Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia

* * *

“SAYA BEKERJA SELAMA 6 TAHUN HANYA DIKONTRAK SELAMA 2 BULAN [TIAP KALI]. KAMI MERASA GELISAH PADA SAAT BEKERJA, TERUTAMA DI BULAN KEDUA KAMI AKAN MERASA TIDAK NYAMAN.”

* * *

Ara, mantan pekerja pengolahan udang di Indonesia

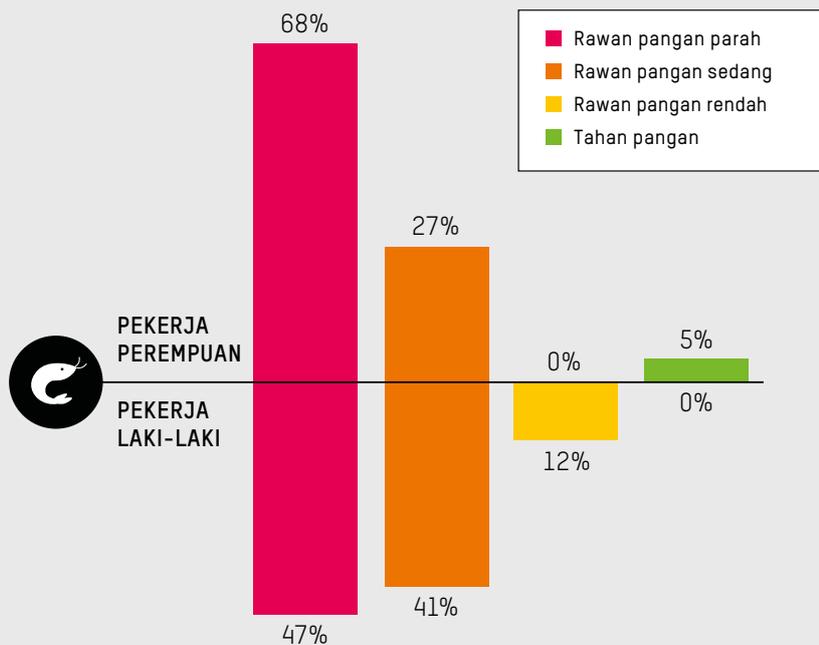
Upah rendah, sistem kerja borongan dan jam kerja yang berlebihan

- Di Thailand, para pekerja melaporkan bahwa mereka dibayar upah harian dalam jumlah minimum, atau berdasarkan borongan. Biasanya mereka bekerja enam hari dalam seminggu. Pekerja borongan dari sebuah pabrik mengeluh kepada Oxfam tentang bagaimana tarif per kilo sebelumnya dipajang dengan jelas di dalam fasilitas, tetapi sekarang informasi ini telah dihapus dan pengawas di stasiun penimbangan tidak mau menginformasikan kepada pekerja tentang tarif tersebut ketika ditanyai.
- Hla Hla Win menginformasikan kepada Oxfam tentang bagaimana, dia hanya menerima THB 7.200 (\$216) tanpa kerja lembur, untuk pekerjaan sebulan penuh mengupas udang di sebuah pabrik di Samut Sakhon. Srey Neth memperkirakan bahwa meskipun ia hanya mendapat THB 7.800 (\$234) selama 26 hari kerja penuh waktu selama sebulan

tanpa lembur, pengeluaran rumah tangganya di Thailand sekitar THB 6.600 (\$6,600) per bulan, sebagian besar untuk makan. Setelah lima bulan bekerja di pabrik pangan laut, Srey Neth masih berhutang kepada perusahaan dan juga perlu membayar kembali sebesar THB 500 (\$15) ke perusahaan tersebut setiap dua minggu.

- Semua migran yang bekerja di pengolahan pangan laut yang diwawancarai oleh Oxfam melaporkan bahwa mereka meminta atau bersedia untuk bekerja lembur apabila tersedia kesempatan.⁸⁵ Para migran memberi tahu Oxfam bagaimana mereka akan bekerja rata-rata tiga atau empat *shift* lembur per minggu, dengan beberapa pekerja melakukan lembur setiap hari kerja.
- Upah sangat rendah sehingga pekerja pangan laut di tiga provinsi Thailand⁸⁶ menceritakan bahwa jika mereka tidak bekerja lembur, mereka tidak dapat membeli barang-barang sekunder seperti pakaian, apalagi untuk menyokong keluarga mereka di rumah. Sebuah survei yang dilakukan untuk menilai tingkat keamanan pangan mengungkapkan bahwa mayoritas perempuan yang berbicara pada Oxfam di Thailand dapat dianggap sangat rawan pangan. Tanggapan survei kami menunjukkan bahwa para perempuan mengurangi biaya makanan mereka cukup besar, sementara laki-laki cenderung berkompromi pada kualitas makanan.

GAMBAR 5: HASIL SURVEY SKALA AKSES KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DI KALANGAN PARA PEKERJA PENGOLAHAN HASIL LAUT THAILAND⁸⁷



Sumber: Penelitian yang dilakukan oleh Oxfam dan mitra-mitra. Deskripsi metodologi tersedia Lampiran 1

- Di Indonesia, responden mengatakan pembayaran upah minimum daerah berkisar antara Rp 1,7 juta (\$127) hingga Rp 3,2 juta (\$239) per bulan⁸⁸ di beberapa pabrik untuk mencapai kuota sekitar 19kg/jam udang olahan. Banyak perempuan mengatakan kepada para peneliti bahwa mereka tidak dapat memenuhi kuota mereka dalam 8 jam hari / kerja, sehingga banyak pekerja yang bekerja lembur kurang lebih satu jam per hari tanpa dibayar dan/atau memotong waktu istirahat, yang berarti melanggar UU Ketenagakerjaan di Indonesia yang berkaitan dengan upah minimum daerah.⁸⁹
- Pekerja di satu pabrik di Indonesia juga melaporkan dipekerjakan dengan sistem magang dua bulan di mana upah jauh lebih rendah daripada upah minimum

“SAYA HARUS BEKERJA SEKITAR SEMBILAN SETENGAH HINGGA SEPULUH JAM SETIAP HARI. ITU NORMAL. KAMI MULAI BEKERJA PADA JAM 5:30 SORE DAN JIKA KAMI MEMULAI ISTIRAHAT UNTUK MAKAN MALAM PADA JAM 6:00 MALAM, KAMI HARUS KEMBALI DAN MULAI KEMBALI BEKERJA PADA JAM 7:00 MALAM. DAN TIDAK ADA ISTIRAHAT PANJANG SAMPAI 4:30 PAGI. BUKANKAH KITA HARUS ISTIRAHAT.”

Khin, pekerja pengolahan pangan laut di Thailand

“KEHADIRAN DIGUNAKAN UNTUK MENILAI APAKAH KAMI BENAR-BENAR SERIUS BEKERJA ATAU TIDAK. JIKA SAYA TINGGAL DI RUMAH KARENA MERASA TIDAK SEHAT, ITU AKAN BERPENGARUH PADA KONTRAK SAYA. JIKA KAMI TIDAK BEKERJA LEBIH DARI 2 KALI DALAM SEBULAN, KAMI AKAN MENDAPATKAN KONTRAK YANG LEBIH PENDEK.”

Dewi, pekerja pengolahan udang di Indonesia

regionalnya – sekitar Rp 1,2 juta (\$88) per bulan – dan beberapa melaporkan bahwa hak mereka untuk cuti sakit ditolak⁹⁰. Pekerja di pabrik lain mencatat bahwa mereka tidak diberikan hari libur 4 hari per bulan.

Lingkungan kerja yang merendahkan, tidak sehat, dan tidak aman

- Di Indonesia dan Thailand, pekerja pengolahan melaporkan lingkungan kerja yang tidak aman, tidak sehat dan menghinakan. Banyak pekerja yang melaporkan bahwa istirahat ke toilet dikontrol secara ketat dan dijadikan sarana pendisiplinan. Sebagai contoh, satu kelompok pekerja di Thailand melaporkan bahwa hanya sembilan toilet tersedia untuk lebih dari 1.000 pekerja. Pekerja di Indonesia juga menggambarkan bahwa mereka tidak pergi ke toilet karena takut mendapatkan surat peringatan, kekerasan verbal yang didapatkan dari pengawas dan juga adanya ketakutan karena waktu kerja yang hilang sehingga mereka tidak dapat memenuhi kuota mereka. Di kedua negara tersebut, terdapat contoh perempuan yang mengalami infeksi saluran kemih.
- Beberapa pekerja di pabrik di Indonesia mengungkapkan bahwa akses ke air minum juga dikendalikan. Misalnya, izin diperlukan untuk minum, hanya beberapa gelas disediakan untuk ratusan pekerja, dan air yang disediakan berkualitas rendah. Yang lain mengatakan bahwa mereka tidak minum karena waktu yang hilang pada saat mereka minum akan berdampak dalam upaya mereka untuk memenuhi target produksi.
- Beberapa pekerja di Indonesia menjelaskan bahwa bekerja di lingkungan demikian sangatlah melelahkan, kondisi yang dimaksud seperti bekerja di suhu yang hampir beku dan terpapar air panas serta klorin. Para pekerja melaporkan mereka sering jatuh pingsan di lantai pabrik dan beberapa pekerja melaporkan adanya titik-titik putih di tangan mereka akibat sering terpapar zat kimiawi. Di banyak pabrik baik di Thailand dan Indonesia, para pekerja menyatakan mereka diharuskan menyediakan sendiri alat pelindung dirinya.

Dewi bekerja di pabrik pengolahan udang di Indonesia selama delapan tahun. Dia pergi karena pabrik pindah dan upah diturunkan setengahnya. Dia selalu mendapat kontrak jangka pendek sehingga tidak mendapat hak untuk cuti hamil. Dia mengundurkan diri ketika dia hamil delapan bulan dan dipekerjakan kembali sebulan setelah bayinya lahir.

Foto: Adrian Mulya/
Aliansi Pangan Laut
Berkelanjutan Indonesia



“DI BAGIAN PEMOTONGAN KEPALA (UDANG), JARAK DARI TOILET LUMAYAN JAUH. KAMI CUMA PUNYA WAKTU 10 MENIT. DALAM WAKTU YANG SAMA, KAMI BISA NGERAMPUNGIN DUA EMBER UDANG. ITU MAKANYA KAMI HARUS MENAHAN, SOALNYA KAMI BUTUH UANG. KAMI LANJUT AJA, SAMPAI UDAH NGGAK KUAT LAGI.”

Ara, mantan pekerja pengolahan udang di Indonesia

“SAYA HARUS MENAHAN DIRI SUPAYA NGGAK KENCING DI LUAR JAM ISTIRAHAT MAKAN SIANG. SEBELUM BEKERJA, SAYA IKAT BAJU SUPAYA BISA MENAHAN DIRI SEBELUM JAM MAKAN SIANG. SAYA BIKIN SIMPUL DI BAJU SAYA.”

Dewi, mantan pekerja pengolahan udang di Indonesia.

Diskriminasi gender

Oxfam dan Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia menemukan bahwa tes kehamilan pada saat rekrutmen merupakan sesuatu yang lazim di sektor pengolahan udang Thailand dan Indonesia. Pekerja di Indonesia melaporkan bahwa pekerja yang hamil tidak akan diperbarui kontraknya sementara yang kembali bekerja setelah hamil hanya diberi status 'magang' dengan upah yang lebih rendah.

Di Indonesia, beberapa pekerja melaporkan bahwa hak mereka untuk cuti haid⁹¹ tidak diakui, bahkan perempuan tidak diperkenankan untuk membawa pembalut tambahan selama menstruasi, yang mengharuskan mereka untuk menggunakan pembalut yang sama selama 9 jam sehari atau menggunakan beberapa pembalut di saat bersamaan sebelum mereka memulai bekerja.



Koneksi supermarket

Banyaknya praktek tersebut hadir dalam rantai pasok udang dari sebagian besar supermarket terbesar di Jerman, Belanda, Inggris, dan AS.

Perusahaan-perusahaan berikut ini membenarkan atau tidak menyangkal kepada Oxfam bahwa mereka mengambil udang atau pernah mengambil dari satu atau lebih dari pemasok tempat para pekerja yang diwawancarai⁹²:

- Albertson's, Costco, Kroger, Walmart dan Wholefoods yang bermarkas di AS;
- Morrisons, Sainsbury's dan Tesco, yang bermarkas di Inggris;
- Ahold Delhaize⁹³ and Jumbo⁹⁴ bermarkas di Belanda; dan
- Beberapa perusahaan nasional seperti Aldi North dan Aldi South, Edeka, Lidl dan Rewe yang bermarkas di Jerman.

Hal ini berarti bahwa setiap supermarket raksasa tersebut menjual dan pernah menjual produk di toko mereka yang berkemungkinan besar terkait dengan setidaknya beberapa pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja yang disebutkan di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk tidak mengkaitkan masalah hak-hak pekerja spesifik dengan perusahaan pemasok tertentu, tetapi untuk mengidentifikasi jenis masalah yang harus diketahui semua supermarket dan konsumen pangan laut serta banyak rantai pasok pangan lainnya. Contoh-contoh yang diberikan di sini cukup luas untuk membuktikan bahwa tantangannya bukan hanya seputar satu atau dua rantai pasok yang problematis, melainkan akan menjadi jantung model penyuplaian supermarket yang sistemik.

Meskipun ketertelusuran produk ke masing-masing kapal perikanan sulit dilacak, beban pembuktian tetap berada di tangan supermarket untuk menunjukkan kepada seluruh pemangku kepentingannya bahwa rantai pasok mereka bebas dari eksploitasi kerja yang dicontohkan di atas, dan apabila mereka terbukti melakukan eksploitasi semacam itu, mereka harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengatasinya.

"KALAU ADA YANG HAMIL MAKA DIA BAKAL LANGSUNG DISURUH KE DOKTER PERUSAHAAN DAN NGGAK DIKONTRAK LAGI, JADI DIA HARUS MENGUNDURKAN DIRI."

Bunga, mantan pekerja pengolahan udang di Indonesia

Walaupun penjelasan singkat ini berfokus pada tantangan yang dihadapi pekerja di kapal dan di pabrik pengolahan, kondisi di pertambakan juga sama mengkhawatirkannya. Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia bekerja sama dengan petambak di sektor petambakan Indonesia, mengungkapkan adanya persoalan dari mereka untuk mendapatkan harga yang adil bagi udang mereka, bahkan di perusahaan yang menerima akreditasi *Aquaculture Stewardship Council (ASC)*.⁹⁵



3. AKAR PERMASALAHAN

Seperti dijelaskan dalam Bagian 1, ada beberapa kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Paling tidak, kesadaran akan tantangan seputar hak buruh telah meningkat; transparansi seputar kondisi kerja dan ketertelusuran produk dalam rantai pasok pangan laut yang rumit telah semakin membaik; dan sejumlah besar pekerja telah mendapat manfaat dari kondisi kerja yang lebih baik sebagai akibat dari kebijakan yang diperkuat dan praktik-praktik baru.

Walaupun banyak dari inisiatif baru disambut dengan baik dan memberikan landasan penting untuk membangun, namun kebanyakan belum mampu untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran hak-hak pekerja di rantai pemasok udang dan rantai pasok makanan internasional lainnya secara memadai. Jika tiba saatnya mereka mampu melakukannya, tantangan seperti yang dijelaskan dalam Bagian 2 akan terus muncul. Tantangan yang paling utama terletak pada ketidakseimbangan yang mencolok dalam kekuasaan rantai supermarket, dan distribusi tidak seimbang dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan.

MENINGKATNYA KEKUATAN SUPERMARKET UNTUK MENETAPKAN HARGA DAN MEMAKSIMALKAN KEUNTUNGAN

Sesuai pembahasan dalam laporan utama peluncuran kampanye terbaru Oxfam,⁹⁶ pertumbuhan kekuatan supermarket dalam rantai pasok makanan telah turut andil dalam meningkatkan eksploitasi tenaga kerja di negara-negara penghasil sumber daya makanan. Dalam banyak rantai pasok makanan, supermarket telah menjadi aktor dominan yang mampu menggunakan posisi mereka sebagai penjaga gerbang ke pasar konsumen massal untuk terus menerus menekan harga dari pemasok mereka, sementara mereka juga bersikeras untuk menuntut peningkatan kualitas.

Penelitian terbaru Oxfam – yang diambil dari Biro Penilaian Dampak Sosial untuk Informasi Warga – *Bureau for the Appraisal of Social Impacts for Citizen Information* (BASIC) yang ditunjukkan dalam laporan menegaskan bahwa sebagai akibatnya, supermarket tidak hanya mendapatkan keuntungan terbesar dibanding semua aktor dalam rantai pasok makanan, tetapi juga bahwa selama 20 tahun terakhir bagian yang mereka dapatkan merupakan yang paling banyak meningkat. Sementara itu, bagian kecil yang tersisa untuk produsen makanan semakin menurun. Dalam kasus produsen di negara berkembang, hal ini seringkali diikuti dengan peningkatan biaya produksi.⁹⁷

Dinamika ini tampaknya tercermin dengan baik dalam rantai pasok udang di supermarket dari Asia Tenggara. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6, analisis BASIC menyarankan bahwa di antara tahun 2000 dan tahun 2015, pemenang terbesar dalam rantai pasok udang yang mengambil dari Thailand dan Indonesia adalah supermarket dan pelaku yang paling terkalahkan justru adalah perusahaan pemasok udang di negara tersebut:

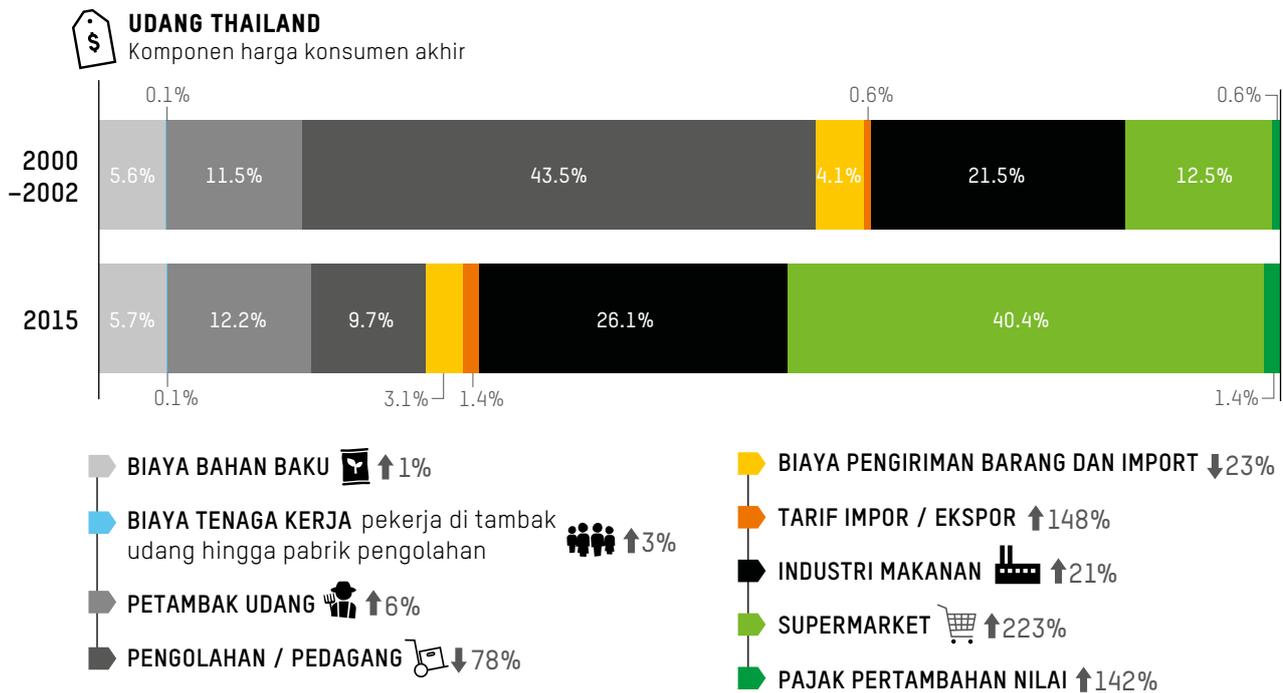
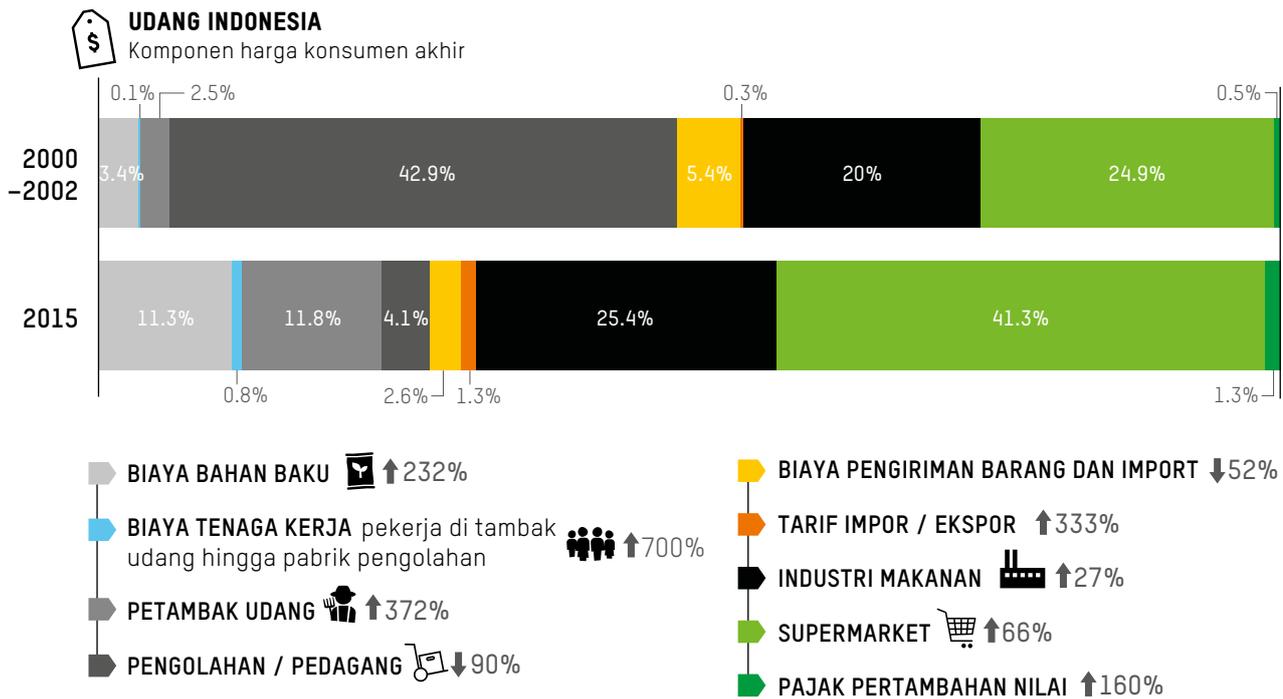
- Di Jerman, Belanda, Inggris, dan AS, rata-rata harga konsumen untuk udang telah meningkat sebanyak 50%, Rata-rata, supermarket telah meningkatkan bagian mereka dari harga konsumen akhir untuk udang Indonesia dari sekitar 25% menjadi 41% dan untuk udang Thailand dari sekitar 13% hingga 40%.⁹⁸
- Pada saat yang sama, pihak mendapat bagian paling rendah adalah perusahaan pengolahan udang di kedua negara tersebut, yang bagiannya menurun dari sekitar 43% ke 4% pada kasus Indonesia dan dari sekitar 44% menjadi 10% dalam kasus Thailand.

* * *

**RATA-RATA,
SUPERMARKET TELAH
MENINGKATKAN
BAGIAN MEREKA DARI
HARGA KONSUMEN
AKHIR UNTUK UDANG
INDONESIA DARI
SEKITAR 25% MENJADI
41% DAN UNTUK
UDANG THAILAND DARI
SEKITAR 13% HINGGA
40%.⁹⁹**

* * *

GAMBAR 6: SUPERMARKET TELAH MENINGKATKAN BAGIAN MEREKA DARI HARGA KONSUMEN AKHIR UNTUK UDANG INDONESIA DAN THAILAND (WARNA HIJAU), SEMENTARA SISANYA UNTUK PERUSAHAAN PENGOLAHAN UDANG TELAH MEROSOT.



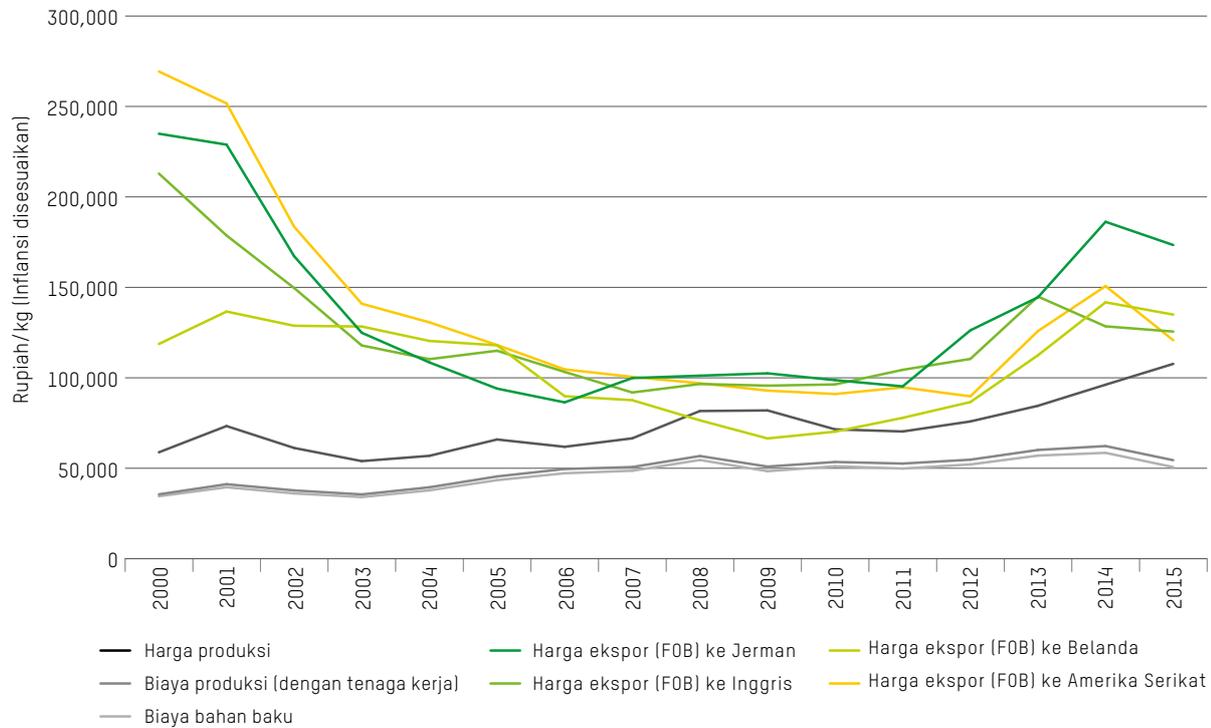
Sumber: C. Alliot et al. (Akan Datang). *Distribution of Value and Power in Food Value Chains*. Penelitian Oxfam yang dilakukan melalui BASIC. Berdasarkan rata-rata tertimbang dari empat negara pengkonsumsi: Jerman, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat. Lihat lampiran metodologi untuk informasi lebih lanjut.



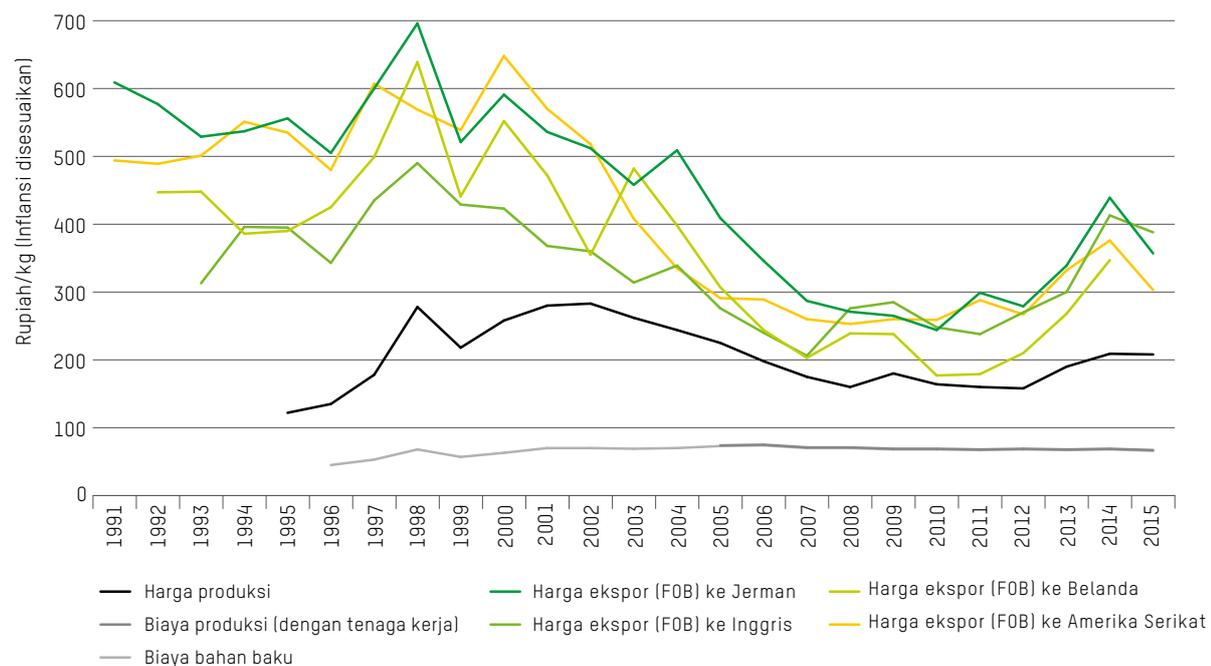
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7, sejak akhir 1990an di Thailand dan 2000 di Indonesia, telah terjadi penurunan jangka panjang yang signifikan terhadap harga ekspor udang (dengan lonjakan harga jangka pendek pada tahun 2013-14 akibat merebaknya penyakit *Early Mortality Syndrome* yang menyerang produksi udang di Thailand) menjadi sepertiga atau lebih di kedua negara.

GAMBAR 7: HARGA EKSPOR UDANG INDONESIA DAN THAILAND TELAH TURUN SECARA SIGNIFIKAN

INDONESIA



THAILAND



Source: C. Alliot et al. (Forthcoming). *Distribution of Value and Power in Food Value Chains*. Penelitian Oxfam yang dilakukan oleh BASIC. Harga ekspor didasarkan pada kontrak *free-on-board* (FOB¹⁰⁰).

Konteks ini penting untuk memahami bagaimana pasar mendorong pelanggaran hak pekerja di pabrik pengolahan udang, khususnya di pemasok berukuran kecil dan menengah. Selama pemasok negara berkembang – baik yang tergabung di rantai pasok untuk udang Asia Tenggara, jus jeruk Brazil atau kacang hijau Kenya yang digali di laporan kampanye utama¹⁰¹ – masih menghadapi tekanan harga ke bawah, ditambah dengan standar kualitas yang semakin ketat, dan biaya produksi yang terus bertambah, maka pekerja-pekerja rentan yang akan dipaksa untuk mengencangkan ikat pinggang.

Upah layak dapat diwujudkan

Namun, analisis baru untuk Oxfam ini juga menegaskan bahwa membayar pekerja dengan upah layak dalam rantai pasok udang tidak mustahil dilakukan, sekalipun hal tersebut tetap menjadi tantangan yang kompleks.¹⁰² Seperti yang ditunjukkan di Tabel 1, Investasi tambahan yang diperlukan untuk lebih mensejahterakan pekerja di Thailand atau Indonesia agar menyentuh tolok ukur Upah Minimum Asia¹⁰³, misalnya, setara hanya di antara 0,4 % dan 0,5% dari harga akhir konsumen untuk udang konsumendi negara-negara konsumen yang diniai.¹⁰⁴

Bahkan, peningkatan marginal ini tidak perlu diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi di kasir, jika nilai yang didapatkan dibagi lebih adil di sepanjang rantai. Seperti terlihat pada Tabel 1, analisis BASIC membenarkan bahwa, antara pertengahan tahun 1990an dan 2015, di supermarket-supermarket di Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat (atau di beberapa kasus importir pengolahan pangan yang mereka ambil) telah meningkatkan pangsa mereka akhir dalam rantai nilai udang dengan jumlah berkali-kali lipat lebih dari investasi tambahan yang diperlukan untuk membayar para pekerja pengolahan udang di Thailand atau Indonesia.¹⁰⁶

Meskipun peningkatan nilai yang diperoleh para pelaku ini tidak boleh dianggap sebagai laba bersih, analisis ini menunjukkan bahwa ada nilai yang cukup dalam rantai tersebut yang dapat digunakan untuk membayar upah layak bagi pekerja, seandainya terdapat mekanisme yang ditentukan untuk mendistribusikannya secara lebih adil demi kepentingan pekerja.

INVESTASI TAMBAHAN YANG DIPERLUKAN UNTUK LEBIH MENSEJAHTERAKAN PEKERJA DI THAILAND ATAU INDONESIA AGAR MENYENTUH TOLOK UKUR UPAH MINIMUM ASIA SETARA PADA SEKITAR 0,3% DARI HARGA KONSUMEN UDANG DARI INDONESIA DAN SEKITAR 0,5% DARI HARGA KONSUMEN UDANG DARI THAILAND.¹⁰⁵

TABEL 1: UPAH LAYAK BAGI PARA PEKERJA PENGOLAHAN UDANG DI INDONESIA DAN THAILAND SANGAT BISA DIWUJUDKAN

 Negara produsen	 Biaya tenaga kerja pengolahan udang pada 2015 (US \$ / kg)	 Kesenjangan upah layak bagi pekerja pengolahan udang pada tahun 2015 (US \$ / kg)	 Negara konsumen	 Kesenjangan upah layak sebagai % dari harga konsumen	 Saham supermarket sebelumnya (atau produsen) – pada tahun 1996 untuk Indonesia dan pada tahun 2001 untuk Thailand (US \$ / kg)	 Saham supermarket pada tahun 2015 (US \$ / kg)
INDONESIA	\$0.29	\$0.15	Jerman	0.4%	\$3.33	\$7.78
			Belanda	0.5%	\$5.47	\$7.48
			Inggris	0.5%	\$2.17	\$8.05
			Amerika Serikat	0.4%	\$4.28	\$16.16
THAILAND	\$0.35	\$0.16	Jerman	0.5%	\$2.42	\$8.22
			Belanda	0.5%	\$6.02	\$7.86
			Inggris	0.5%	\$9.34 (6.06)	\$5.10 (\$12.10)
			Amerika Serikat	0.5%	\$9.60	\$16.08

Sumber: C. Alliot et al. (Akan Datang). *Distribution of Value and Power in Food Value Chains*. Penelitian Oxfam yang dilakukan oleh BASIC.



Susi, mantan pekerja di industri udang, pernah tinggal di asrama perusahaan di Indonesia. Dia tidak menyimpan salinan kontraknya dan tidak bisa menolak lembur – terkadang tiga jam tambahan setelah jam kerja usai. Dia tidak berani mengeluh kepada atasannya atau bahkan pekerja lain tentang masalahnya.

Foto: Adrian Mulya/Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia



TERBATASNYA KEKUASAAN PEKERJA UNTUK MEMBELA HAKNYA

Memastikan adanya distribusi nilai yang lebih adil dalam rantai pasok udang – atau rantai pasok lainnya – sebetulnya hanya akan bermanfaat ketika pekerja yang lebih berdaya mampu mengambil peluang dari situasi tersebut. Oleh karena itu, penurunan kekuatan pekerja di berbagai negara dan sektor menjadi signifikan ketika pada saat yang sama kekuatan supermarket dan firma besar lainnya di rantai pasok internasional justru meningkat – yang mengakibatkan peningkatan kerentanan para pekerja terhadap eksploitasi.

Seperti yang telah dibahas dalam laporan peluncuran utama, seiring dengan meluasnya rantai nilai global dalam 30 tahun terakhir, daya tawar pekerja telah berkurang.¹⁰⁷ ILO telah mengamati sebuah penurunan jangka panjang dalam tingkat keanggotaan serikat pekerja di banyak negara,¹⁰⁸ dan *International Trade Union Confederation / Konfederasi Serikat Perdagangan Internasional (ITUC)* telah lama mendokumentasikan upaya pemberangusan serikat pekerja. Serangan terhadap anggota serikat tercatat di 59 negara pada tahun 2017. Lebih dari tiga-perempat negara menolak beberapa atau seluruh hak pekerja untuk mogok.¹⁰⁹

Organisasi pekerja khususnya sangat lemah dalam rantai pasok makanan. Dalam survei global terhadap hampir 1.500 perusahaan dalam rantai pasok global, kurang dari seperempat pemasok makanan mencatat adanya kehadiran serikat pekerja.¹¹⁰ Bahkan ketika serikat hadir, mereka sering tidak diikutsertakan dalam diskusi manajemen terkait upah atau kondisi kerja.¹¹¹

Kurangnya perwakilan buruh sangatlah berdampak bagi pekerja migran dan juga perempuan, sebagaimana ditunjukkan dalam situasi rantai pasok udang. ILO memperkirakan bahwa kurang dari 2% pekerja migran di Thailand adalah bagian dari serikat pekerja, sedangkan perjanjian kerja bersama tidak pernah dibuat.¹¹² Penelitian yang dilakukan oleh Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia di pabrik pengolahan udang di Indonesia menemukan bahwa salah satu konsekuensi dari pekerjaan subkontrak dan/atau menggunakan kontrak jangka pendek dan/atau informal adalah terbatasnya akses pekerja terhadap perwakilan serikat pekerja.

Kurangnya suara pekerja juga merupakan kelemahan utama dari beberapa inisiatif hak-hak buruh yang diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir. *Seafood Task Force*, yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Kotak 3, sebagai pendekatan dari atas ke bawah, yang didorong oleh kekhawatiran dan kepentingan supermarket dan pemasok mereka yang kuat, umumnya tidak melibatkan organisasi pekerja dan aktor masyarakat sipil di Thailand.

Ada beberapa pengecualian penting, yang juga dijelaskan dalam Kotak 3, yang dirancang untuk memperkuat suara pekerja *vis-a-vis* majikannya. Kemitraan antara Serikat Thailand dengan Jaringan Hak Pekerja Migran untuk membentuk pelatihan dan komite kesejahteraan pekerja merupakan sebuah langkah penting. Begitu pula dengan pekerjaan yang dilakukan Institut Issara, yang didukung oleh sejumlah supermarket, produsen dan eksportir, yang pendekatan Pemantauan

Ketenagakerjaan Inklusif-nya bergantung pada upaya menawarkan kanal baru agar suara pekerja didengar.

Namun, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Koalisi CSO, mengungkapkan bahwa terdapat tantangan yang besar untuk membangun kesadaran akan hak-hak pekerja dan kepercayaan diri untuk menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia. Dalam survei terhadap 300 pekerja migran di enam provinsi pesisir Thailand, 71% responden menyatakan bahwa mereka tidak merasa mendapatkan cukup informasi mengenai hak mereka sebagai pekerja, namun 90% mengatakan bahwa mereka tidak pernah melaporkan pelanggaran hak pekerja.¹¹³

Apa yang telah ditunjukkan dalam temuan ini adalah bahwa tidak peduli seberapa canggih atau inovatif teknologi yang diadopsi, hal tersebut akan tetap gagal bahkan untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung – apalagi untuk membantu mengakhirinya – kecuali apabila ketidakseimbangan kekuasaan antara pekerja dan majikan sudah berhasil ditangani. Pada akhirnya, jika ketidakseimbangan kekuasaan ini ingin diatasi, maka tidak ada cara lain selain pembentukan serikat pekerja yang efektif, pengakuan penuh atas hak kebebasan berserikat untuk semua pekerja, dan lembaga perundingan bersama di tempat kerja. Untuk tujuan ini, pemerintah harus memastikan perlindungan hukum berada di tempatnya dan ditegakkan dengan benar. Sementara itu supermarket dan pemasoknya harus memastikan hak-hak tersebut terwujud di seluruh operasi dan rantai pasok mereka.

Seperti yang akan dijelaskan dalam Kotak 7, sejumlah contoh muncul dari upaya yang dirancang secara eksplisit untuk meningkatkan kekuatan dan suara pekerja dan nelayan skala kecil. Masing-masing memegang beban untuk menjamin perubahan kondisi kerja yang lebih berarti, dan pada akhirnya memberikan bagian yang lebih adil dari nilai dalam rantai pasok udang untuk pekerja dan produsen skala kecil.

* * *

“SAYA INGIN SETIAP PERUSAHAAN ADA SERIKAT PEKERJA DAN MEMBANGUN PKB. PENANDATANGAN PKB MERUPAKAN MOMENTUM PENTING UNTUK MEMBANGUN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG KONDUSIF,”

* * *

Hanif Dhakiri, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, 27 Maret 2018¹¹⁴

KOTAK 7: AKSI KOLEKTIF OLEH NELAYAN SKALA KECIL, PENGUSAHA KECIL, PEREMPUAN, DAN PEKERJA

- Di Thailand, pekerja dan masyarakat sipil telah bersatu dalam ***Civil Society Organisation Coalition for Ethical and Sustainable Seafood / Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Makanan yang Etis dan Berkelanjutan***, untuk memperkuat posisi mereka dalam dialog dengan pemerintah dan industri.¹¹⁵ Oxfam telah berupaya untuk memastikan bahwa nelayan, pekerja dan petani kecil menjadi anggota utama dalam koalisi ini, dengan pangsa kekuasaan, visibilitas, dan suara terbesar.
- Para nelayan Thailand dan Oxfam telah memprakarsai **‘Fisherfolk’**, sebuah **perusahaan sosial milik perempuan dan nelayan** untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan dan harga yang tidak adil dari para tengkulak. Perempuan merupakan pemilik dari semua perusahaan Fisherfolk, dan program uji coba yang telah dilakukan membuktikan bahwa penangkapan ikan artisanal berkelanjutan adalah hal yang mungkin.¹¹⁶ Para nelayan dan Oxfam juga membangun **‘Blue Brand’**, sebuah standar sertifikasi yang dapat diakses oleh petani kecil.¹¹⁷
- Di Filipina, **SENTRO-unionized fish workers** telah berkampanye menentang pemecatan massal yang tidak adil, kebijakan perusahaan anti serikat pekerja dan sistem subkontrak **‘Cabo’**.¹¹⁸
- Di Indonesia, setelah konflik bertahun-tahun dan meningkatnya utang selama satu dasawarsa, **Serikat petambak budidaya Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW) di Dipasena** memperoleh kemandirian dari perusahaan pemiliknya yang mengendalikan harga input budidaya untuk membeli kembali udang. Sekarang petani P3UW dapat membeli dan menjual dari siapa saja yang mereka inginkan.¹¹⁹



4 . SUPERMARKET DAPAT BERBUAT LEBIH BANYAK UNTUK MENGHORMATI HAK-HAK PEKERJA RANTAI PASOK MEREKA

Pemerintah mungkin memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi – dan ada banyak hal lagi yang harus mereka lakukan di negara-negara di seluruh dunia untuk memberlakukan dan menegakkan undang-undang pada akhirnya. Tetapi, supermarket juga memiliki tanggung jawab – di bawah Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia¹²⁰ – dan kekuatan untuk membuat perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan pekerja untuk mewujudkan hak-hak mereka.

Namun, analisis awal Oxfam mengenai kebijakan dan praktik dari beberapa supermarket besar AS dan Eropa menunjukkan bahwa, walaupun beberapa telah melakukan upaya yang lebih besar dari yang lain, sebagai sebuah sektor mereka dapat melangkah lebih jauh dalam memastikan agar hak-hak para pekerja rantai pasok mereka dihargai.

MEMPERKUAT KEBIJAKAN DAN PRAKTIK TERKAIT SUMBER YANG DIMILIKI OLEH SUPERMARKET

Seperti beberapa contoh yang dijabarkan di Bagian 1, terlihat bahwa ada beberapa supermarket yang mengambil langkah untuk mengatasi hak-hak pekerja mereka yang berada dalam sektor pangan laut dan rantai pasok lainnya.

Banyak yang memiliki kode etik yang mengharuskan pemasok mereka untuk menghormati hak-hak inti pekerja, yang juga didukung dengan skema audit. Tetapi dengan bukti yang disajikan dalam Bagian 2, tampaknya menunjukkan bahwa pendekatan audit saat ini telah terbukti kurang mampu mengungkap isu-isu penting seputar hak-hak pekerja. Sistem audit masih memungkinkan potensi penyalahgunaan oleh majikan/pemberi pekerjaan yang tidak bermoral – misalnya, dengan melatih pekerja mengenai apa yang harus mereka katakan, menyimpan duplikat buku yang menunjukkan upah dan jam kerja, atau mengeluarkan alat pelindung hanya ketika auditor berkunjung. Dan bahkan ketika majikan sepenuhnya dan secara terbuka mematuhi audit, pekerja hanya dapat berbicara dengan bebas di luar tempat kerja dan setelah membangun kepercayaan yang tinggi dengan pewawancara yang telah terbukti independen dari majikan.¹²¹

Pihak lain secara sukarela mencoba berinvestasi dalam inisiatif yang tidak bergantung pada audit sosial – seperti bergabung dengan inisiatif seperti *Seafood Task Force* atau mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh Issara Institute. Namun sejauh ini, upaya-upaya tersebut masih berupaya menggapai akar penyebab dari permasalahan terhadap hak-hak pekerja yang diuraikan dalam Bagian 3, khususnya dengan mendukung suara pekerja di tempat kerja mereka. Akan tetapi, yang masih belum dilakukan adalah upaya-upaya untuk mengatasi secara signifikan dampak dari praktik pembelian oleh supermarket sendiri – dari penetapan harga hingga ketentuan-ketentuan kontraktual – yang berkontribusi melemahkan pemenuhan hak-hak pekerja.

* * *

‘DI PABRIK KAMI, PENGUNJUNG BANYAK YANG DATANG KE PABRIK KAMI DAN MENGAMBIL GAMBAR DAN VIDEO DENGAN KAMERA BESAR MEREKA. MANAGER MEMERINTAHKAN KAMI UNTUK TERSENYUM, TERLIHAT BAHAGIA.’

* * *

Zay – pekerja pengolah udang, Thailand, mendiskusikan inspektur audit



Prak adalah pekerja kapal di Thailand. Setelah menderita sakit, ia diberhentikan dari pekerjaannya dan juga diberitahu bahwa dia berutang pada operator kapal sebesar 14.000 Baht (sekitar \$438) – jumlah uang yang tidak ia miliki. Sementara kalau tidak membayar, Prak tidak akan bisa mendapatkan paspornya kembali.

Foto: Suthep Kritsanavarin/Oxfam

HAK-HAK PEKERJA DALAM KARTU SKOR SUPERMARKET OXFAM

Kartu skor supermarket Oxfam¹²² menggunakan informasi yang tersedia secara publik untuk menilai kebijakan rantai pasok dan praktik-praktik supermarket terkemuka di beberapa negara terhadap tolok ukur yang didasarkan pada standar internasional yang kuat dan praktik yang diakui secara luas di empat bidang yaitu: transparansi dan akuntabilitas; pekerja; produsen skala kecil; dan perempuan.

Analisis awal menunjukkan bahwa beberapa supermarket terbesar di Jerman, Belanda, Inggris, dan AS benar-benar gagal untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam melindungi pekerja perempuan dan laki-laki di rantai pasok mereka. Namun meskipun merupakan area yang mendapat nilai tertinggi di sampel awal supermarket kami, tidak ada perusahaan yang mencetak lebih dari 42% untuk kategori 'Pekerja'; rata-rata hanya 12%, dan beberapa bahkan tidak mencetak poin sama sekali (lihat Gambar 8).

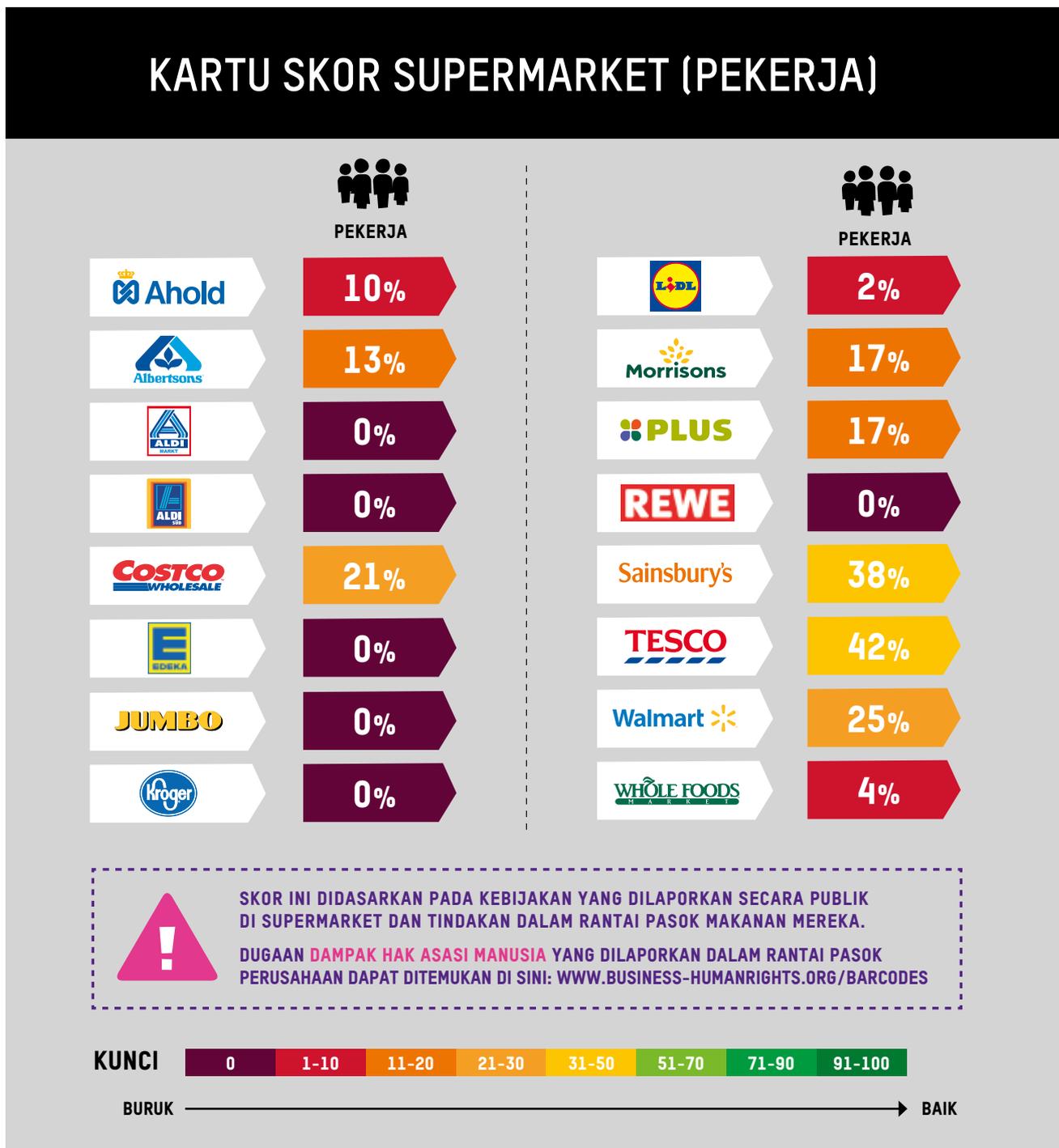
Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa:

- Hanya segelintir perusahaan – **Costco, Morrisons, Sainsbury's, Tesco and Walmart/Asda** – yang telah menerbitkan kebijakan yang menetapkan harapan mereka agar pemasok mematuhi standar pekerja inti ILO, seperti larangan kerja paksa atau pekerja anak, atau komitmen terhadap tempat kerja yang aman dan sehat.
- Lebih sedikit lagi – hanya **Albertson's, Sainsbury's** dan **Tesco** – yang mewajibkan pemasok mereka untuk menunjukkan perbaikan terus-menerus dalam standar ketenagakerjaan dari waktu ke waktu, dan mendukung mereka untuk melakukannya.
- Belum ada supermarket manapun yang telah dinilai menerbitkan sebuah Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia yang layak mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap pekerja dalam rantai pasoknya.
- Hanya satu, **Sainsbury's**, yang telah berkomitmen untuk menghilangkan praktik perdagangan yang dapat merusak standar tenaga kerja dalam rantai pasok, misalnya melalui memastikan harga tepat yang memperhitungkan biaya produksi atau volume pesanan yang aman dan dapat diprediksi.
- **Tidak ada** yang telah menetapkan komitmen untuk melibatkan serikat pekerja dan menghilangkan hambatan terhadap kebebasan berserikat pekerja atau untuk memastikan bahwa pemasok dibayar cukup untuk memungkinkan pekerja mereka dibayar upah layak. Tidak ada yang menerbitkan kebijakan gender mengenai tantangan khusus yang dihadapi pekerja perempuan di rantai pasok mereka atau melacak dan mengungkapkan data terpilah jenis kelamin secara

sistematis misalnya, untuk upah atau jenis kontrak. Hanya satu – **Walmart** – telah mengungkapkan contoh dukungan yang cukup kepada pemasok untuk mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan gender di sektor ini.

- Tidak ada yang melakukan cukup banyak untuk mendukung kebebasan berserikat pekerja atau hak mereka mendapatkan upah layak.

GAMBAR 8: HAK-HAK PEKERJA DALAM KARTU SKOR SUPERMARKET OXFAM



MOTIVASI BISNIS UNTUK AKSI YANG LEBIH NYATA

Kasus-kasus yang dijabarkan diatas tidak seharusnya terjadi. Adalah suatu kewajiban moral dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ditetapkan dalam paparan ini, supermarket juga memiliki motivasi bisnis untuk melakukannya, sebagaimana digambarkan di Gambar 9.

GAMBAR 9: MOTIVASI BISNIS UNTUK AKSI YANG LEBIH NYATA PADA HAK-HAK PEKERJA DI RANTAI PASOK TERLETAK PADA PENANGANAN RISIKO DAN MENANGKAP PELUANG BARU



Sumber: Berbagai sumber antara lain *Ethical Trading Initiative and Holt International Business School (2016), Corporate Leadership on Modern Slavery, London: Ethical Trading Initiative; UN Principles on Responsible Investment (2016), From Poor Working Conditions to Forced Labour - What's Hidden in Your Portfolio? A Guide to Investor Engagement on Labour Practices in Agricultural Supply Chains, London: UNPRI; Deloitte (2016), The Ripple Effect: How Manufacturing and Retail Executives View the Growing Challenge of Supply Chain Risk, London: Deloitte; and Price Water House Cooper (2016), Workforce of the Future: the Competing Forces Shaping 2030, London: PWC.*

REKOMENDASI

Perlindungan hak-hak pekerja untuk perempuan dan laki-laki di supermarket rantai pasok memerlukan tindakan dari supermarket, pemasok dan pemerintah yang disesuaikan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki. Berbagai rekomendasi diberikan dalam laporan utama *Ripe for Change*, yang menjadi bagian dari kampanye untuk mengatasi penderitaan manusia dalam rantai pasok pangan.

Kartu skor Supermarket Oxfam, juga menyediakan satu set tolok ukur terperinci yang menantang, tapi bermakna untuk tindakan pada supermarket berdasarkan pedoman atau standar yang diakui secara internasional.

Ringkasan rekomendasi utama untuk supermarket secara khusus diberikan di bawah ini:

Ketahui dan tunjukkan risiko yang terkait dengan hak pekerja

- Publikasikan nama jenis produk, lokasi produksi dan lokasi sumber untuk semua pemasok lapis pertama dan kedua, lalu perbarui informasi ini secara teratur.
- Berkomitmen untuk melakukan penilaian uji kelayakan (*due diligence*) Hak Asasi Manusia, selaras dengan UNGP, termasuk komitmen terhadap Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia reguler untuk produk makanan dengan risiko pelanggaran HAM tinggi, dan untuk mengembangkan mekanisme pengaduan rantai pasok.



- Lakukan penilaian terhadap jumlah pekerja perempuan dan pria, serta tingkat upah rata-rata di tingkat lokasi produksi untuk produk makanan berisiko tinggi, seperti makanan laut, dan lacak rasio jenis kelamin ini dari waktu ke waktu.
- Berkomitmen untuk memperkirakan dan menerbitkan pembagian nilai bagi pekerja dengan gaji terendah pada setiap tahap rantai pasok untuk rantai pasok dengan risiko pelanggaran HAM tinggi.

Berkomitmen untuk bertindak dalam rantai pasok mereka sendiri

- Pastikan bahwa kebijakan hak asasi manusia dan rantai pasok perusahaan tersedia untuk publik, sesuai dengan konvensi ILO dan undang-undang ketenagakerjaan yang relevan, berlaku untuk operasi perusahaan sendiri dan rantai pasok mereka yang lebih luas dan mencakup rencana tindakan yang terikat waktu untuk implementasi dan pelaporan kemajuan secara teratur.
- Kebijakan tersebut khususnya harus :
 - Memastikan bahwa penggunaan broker tenaga kerja tidak menghalangi kebebasan memilih kerja dan bahwa biaya perekrutan dibayarkan oleh atasan – bukan pekerja.¹²³
 - Menyertakan kebijakan gender yang mencakup: komitmen terhadap perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi semua perempuan dalam operasi mereka sendiri dan dalam rantai pasok mereka; pencegahan diskriminasi gender dalam perekrutan dan promosi (termasuk kewajiban untuk tes kehamilan); upah yang sama untuk pekerjaan yang setara; dan perlindungan terhadap pelecehan seksual selama proses rekrutmen, di tempat kerja atau saat bepergian ke dan dari tempat kerja;
 - Termasuk komitmen untuk membayar upah layak bagi semua pekerja, berdasarkan pada perundingan bersama atau metodologi yang ditentukan secara independen. Hal ini memerlukan komitmen untuk menerbitkan kesenjangan antara upah pekerja perempuan dan laki-laki yang berlaku (termasuk di mana berdasarkan tingkat suku bunga, dan tanpa lembur) dan tolok ukur upah layak, dan untuk menentukan tolok ukur tersebut sebagai biaya yang tidak dapat dinegosiasikan ke dalam negosiasi harga perusahaan dan persyaratan kontrak dengan pemasok.
 - Berkomitmen untuk meninjau dan menerbitkan kebijakan insentif pembeli perusahaan, sehingga pembeli terinsentif untuk menghormati hak manusia dan pekerja dalam rantai pasok.
 - Menjamin adanya *engagement* secara rutin, bermakna, dan konstruktif dengan serikat pekerja dan bentuk asosiasi pekerja lainnya di semua tingkat.

Berkomitmen untuk bertindak melampaui rantai pasok sendiri

- Mengadvokasi bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berasosiasi dilindungi, konvensi ILO diratifikasi dan undang-undang perburuhan yang ketat diberlakukan. Tindakan ini harus dilakukan melalui kolaborasi sedapat mungkin.
- Berpartisipasi secara aktif dalam inisiatif multipihak yang kredibel yang secara efektif menangani masalah ketenagakerjaan dalam rantai pasok makanan dengan risiko pelanggaran HAM tinggi, dan melaporkan secara teratur peran yang mereka mainkan.

CATATAN

- 1 ILO. (2007). *The Impact of Global Food Chains on Employment in the Food and Drink Sector*. Diambil dari: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/meetingdocument/wcms_161663.pdf
- 2 Referensikan laporan utama di sini
- 3 [referensikan Lampiran studi kasus]
- 4 [referensikan Lampiran studi kasus]
- 5 Oxfam and Ethical Tea Partnership (2013), *Understanding Wage Issues in the Tea Industry*, <https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/understanding-wage-issues-in-the-tea-industry-287930>
- 6 Lihat, sebagai contoh: <https://www.hrw.org/news/2002/04/24/ecuador-widespread-labor-abuse-banana-plantations>; <http://www.iuf.org/w/sites/default/files/2014%20Harvesting%20Hunger.pdf>; <http://www.fairtrade-advocacy.org/power/183-projects/psc-main-page/870-the-report-on-imbalance-of-power-in-agricultural-supply-chains>; http://www.supplychainge.org/fileadmin/reporters/all_files/SC_Research_CIR_G2K_OrangeJuice.pdf
- 7 Diolah dari makalah *Steps to a Living Wage in Global Supply Chains* oleh Rachel Wilshaw
- 8 Perundingan bersama mengasumsikan kebebasan berserikat tersedia yang diamanatkan secara hukum. Kebebasan berserikat dan hak berunding bersama adalah hak fundamental yang mendasari semua hak pekerja lainnya. Lihat <http://www.ethicaltrade.org/resources/key-eti-resources/freedom-of-association-in-company-supply-chains-for-a-guide-for-companies>.
- 9 Menurut Konvensi ILO mengenai Kerja Paksa, 1930 (No. 29), kerja paksa didefinisikan sebagai 'seluruh pekerjaan atau jasa yang dilakukan seseorang di bawah ancaman hukuman dan yang mana orang tersebut tidak mengajukan dirinya secara sukarela.' Sebagaimana dicatat ILO, 'ini mengacu pada situasi dimana seseorang dipaksa untuk bekerja melalui penggunaan kekerasan atau intimidasi, atau cara-cara yang lebih halus seperti memanipulasi utang, menahan dokumen identitas atau mengancam diadakan ke otoritas imigrasi.' Lihat: <http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm>
- 10 Lihat sebagai contoh, penyelidikan di the Guardian's pada tahun 2015 - <https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-labour>; atau penyelidikan di Associated Press pada tahun 2015 - <https://apnews.com/b9e0fc7155014ba78e07f1a022d90389/ap-investigation-are-slaves-catching-fish-you-buy>
- 11 Wawancara dengan pekerja di kapal penangkap ikan Thailand dilakukan pada bulan September dan Oktober 2017. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses penelitian, lihat catatan metodologi pada Lampiran 1. R. Willoughby dan T. Gore. (2018). *Ripe for Change*: Catatan metodologi. Nairobi: Oxfam. <http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ripe-for-change-methodology-and-datasets-620478>
- 12 Catatan kaki HRW dan koalisi ILO dan CSO
- 13 Oxfam mengestimasi berdasarkan temuan penelitian di Indonesia dan Thailand dan sumber-sumber sekunder termasuk: D.A.M De Silva. (2011). *Faces of Women in Global Fishery Value Chains: Involvement, Impact and Importance in the Fisheries of Developed and Developing Countries*. Diperoleh dari: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/fisheries/docs/The_role_of_Women_in_the_fishery_value_chain_Dr_De_Silva.doc yang memperkirakan bahwa perempuan merupakan 95% pekerja dalam peran pemrosesan beku udang, 80–85% pekerja di ikan beku memproses peran di Vietnam; dan 80% pekerja dalam peran pengolahan makarel di Thailand.
- Verité. (2016). *Research on Indicators of Forced Labour in the Supply Chain of Tuna in the Philippines*. Diperoleh dari: https://www.verite.org/wp-content/uploads/2016/11/Research-on-Indicators-of-Forced-Labor-in-the-Philippines-Tuna-Sector__9.16.pdf, yang menemukan lebih dari 80% pekerja di pabrik pengolahan tuna kaleng di Filipina adalah perempuan, dengan pekerja yang melaporkan bahwa pekerja laki-laki jarang terlihat di jalur produksi.
- C. Baga et. Al. (2010). *The Global and Local Markets of Penaeus monodon in Bohol Island, Philippines: Gender Role in HACCP Implementation*. Diperoleh dari: <https://genderaquafish.files.wordpress.com/2011/04/32-c-baga-penaeus-monodon.pdf>, yang menemukan 80% pekerja dalam peran pengolahan udang di Filipina adalah perempuan.
- 14 Lihat Kotak 2 untuk deskripsi mengenai tautan supermarket ke pemasok yang pekerjaannya diwawancarai untuk penelitian ini.
- 15 Perlu diketahui bahwa tidak semua contoh yang dikutip dilaporkan oleh pekerja di masing-masing eksportir udang dan pangan laut, tetapi setidaknya beberapa contoh dilaporkan oleh pekerja dari semua eksportir. Beberapa eksportir yang pekerjaannya diwawancarai mengakui kepada Oxfam bahwa beberapa praktik yang dijelaskan tidak ada dalam operasi atau rantai pasok mereka.
- 16 Beberapa pekerja di satu pabrik di Indonesia dan seorang ahli lokal melaporkan bahwa kuota tingkat potongan telah didasarkan pada target setinggi 19 kg per jam. Upah minimum yang relevan di wilayah Indonesia adalah Rp 3.296.712 per bulan, untuk 40 jam kerja seminggu. Jumlah ini merupakan upah per jam sekitar €1.28, atau €0.06 per kg untuk memenuhi target 19 kg. Lihat Lampiran Metodologi untuk deskripsi lengkap dari perhitungan.
- 17 Gaji eksekutif tertinggi pada tahun 2016 adalah USD 19,808,797 di Walmart dan \$6,423,965 di Tesco, berdasarkan data dari S&P Capital. Pekerja di sebuah pabrik di Indonesia melaporkan upah bulanan sebesar Rp 3.152.100 per bulan setelah dikurangi untuk asuransi. Lihat Lampiran Metodologi untuk deskripsi lengkap dari perhitungan.

- 18 *The Asia Floor Wage* adalah perkiraan 'upah hidup', yang dikembangkan oleh koalisi termasuk diantaranya adakah serikat pekerja, organisasi hak asasi manusia dan pekerja, yang dirancang untuk pekerja garmen di wilayah tersebut berdasarkan kebutuhan untuk perumahan, makanan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Meskipun ini merupakan perkiraan yang tidak sempurna, hal ini menawarkan patokan yang berguna untuk menunjukkan betapa tidak memadainya upah yang berlaku bagi pekerja pengolahan udang hasil laut lainnya dibandingkan dengan tingkat upah yang dapat mempertahankan standar kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga mereka di negara mereka. Lihat: <https://asia.floorwage.org/> Lihat Lampiran Metodologi untuk deskripsi lengkap mengenai perhitungan.
- 19 Ref laporan peluncuran utama
- 20 Lihat Bab 2 dari laporan utama.
- 21 Menurut indikator *scorecard* yang relevan, Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia dianggap layak jika menilai dampak dari kegiatan rantai pasok pangan perusahaan terhadap pekerja, dan termasuk rencana tindakan yang diterbitkan untuk mengatasi akar penyebab dampak negatif yang teridentifikasi dalam penilaian tersebut. Hal ini sebaiknya mencakup konsultasi dengan rekan sejawat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lokal yang relevan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan organisasi hak-hak perempuan; dan keterlibatan dengan pekerja perempuan dan laki-laki melalui proses partisipatif.
- 22 Food and Agriculture Organization (2016) *'The State of World Fisheries and Aquaculture 2016: Contributing to Food Security and Nutrition for All'*: <http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf>
- 23 <https://www.ft.com/content/0a04ff90-9312-11e7-bdfa-eda243196c2c> [tambahkan penulis, tanggal dan judul]
- 24 Food and Agriculture Organization (2016) *'The State of World Fisheries and Aquaculture 2016: Contributing to Food Security and Nutrition for All'*: <http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf>
- 25 Konsumsi ikan dunia per kapita telah meningkat dari 9,9 kg di tahun 1960 menjadi 14,4 kg pada 1990-an dan 19,7 kg pada tahun 2013. Meskipun pertumbuhan konsumsi telah stabil di negara-negara berkembang, tetap jauh lebih rendah daripada di negara-negara maju, di mana konsumsi per kapita pada tahun 2013 adalah 26.8 kg. Food and Agriculture Organization (2016) *'The State of World Fisheries and Aquaculture 2016: Contributing to Food Security and Nutrition for All'*: <http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf>
- 26 Budidaya atau pertambakan di air adalah setara dengan pertanian di darat. Ditetapkan secara luas, pertanian mencakup pertanian hewan (peternakan) dan tanaman (agronomi, hortikultura dan kehutanan sebagian). Demikian pula, akuakultur mencakup peternakan dari kedua hewan (termasuk krustasea, ikan dan kerang-lerangan) dan tanaman (termasuk rumput laut dan air tawar *macrophytes*). Sementara pertanian sebagian besar didasarkan pada penggunaan air tawar, akuakultur terjadi di daerah pedalaman (air tawar) dan pesisir (air payau, air laut). Lihat <http://www.fao.org/docrep/003/x6941e/x6941e04.htm>
- 27 F. Natale, A. Borrello, and A. Motova. (2015). *Analysis of the determinants of international seafood trade using a gravity model*. *Marine Policy*, Volume 60, Pages 98-106. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.05.016>
- 28 Food and Agriculture Organization (2016) *'The State of World Fisheries and Aquaculture 2016: Contributing to Food Security and Nutrition for All'*: <http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf>
- 29 <https://www.ft.com/content/4341c29e-bdd4-11e5-9fdb-87b8d15baec2>
- 30 <https://www.undercurrentnews.com/2015/10/30/us-per-capita-shrimp-consumption-rises-11/>
- 31 <https://www.eumofa.eu/documents/20178/77960/The+EU+fish+market+-+2016+Edition.pdf/ca1e7801-c4da-4799-aa00-f3d1784a3021>
- 32 <http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/989543/>
Perlu diketahui bahwa data lengkap untuk 2017 belum tersedia, namun data parsial untuk 2017 menunjukkan bahwa eksportir terbesar untuk udang adalah India, Vietnam, Ekuador dan Cina. Lihat UN Food and Agriculture Organisation (2018), *Globefish Highlights: A Quarterly Update on World Seafood Markets, Rome*: UN Food and Agriculture Organisation. Penelitian yang disajikan dalam laporan ini berfokus pada ekspor udang dari Indonesia dan Thailand, karena ini adalah negara-negara di mana Oxfam memiliki pengalaman bekerja pada isu-isu pangan laut di lapangan secara langsung. Mereka juga adalah dua negara yang saat ini telah menerima perhatian internasional paling banyak terkait dengan masalah hak-hak pekerja dalam rantai pasok pangan laut internasional, dan di mana upaya bersama telah dilakukan untuk mengatasi tantangan ini dalam beberapa tahun terakhir – memberikan dasar yang baik untuk menilai efektivitas berbagai intervensi. Namun, fokus laporan ini pada kedua negara tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa tidak ada tantangan hak tenaga kerja dalam rantai pasok udang dari negara dan wilayah lain – kenyataannya penelitian yang disajikan dalam laporan peluncuran kampanye baru Oxfam tentang ketidaksetaraan dalam rantai pasok pangan menunjukkan bahwa masalah ini tidak terbatas pada satu atau dua negara atau sumber yang bermasalah, tetapi lebih bersifat sistemik dalam rantai pasok pangan global. Karena alasan ini, rekomendasi Oxfam – yang disajikan dalam Bab 5 – secara eksplisit dirancang untuk berhubungan dengan semua rantai pasok. Oxfam berharap perusahaan pangan dapat melakukan uji kelayakan yang baik untuk memastikan mereka tidak memberikan kontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia ketika mereka memasuki pasar yang baru, dan berharap bahwa apabila isu-isu seperti itu ditemukan dalam rantai pasok mereka, mereka akan bekerja untuk mendukung pemasok dalam menyelesaikannya.
- 33 Overfishing telah menciptakan pasar untuk ikan sampah di Thailand, yang kemudian mengakselerasi IUU fishing untuk ikan sampah. Nelayan melaporkan ke Oxfam bahwa, meskipun berkualitas rendah, ikan ini dapat digunakan untuk konsumsi lokal, namun malah dijadikan pakan udang.
- 34 ILO. (2016, 16 November). ILO Work in Fishing Convention No.188 (2007) to enter into force. Diperoleh dari: http://ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_535063/lang--en/index.htm

- 35 Kapal dapat berada di laut untuk periode yang lebih lama, dengan melakukan pemindahan barang di atas laut ke kapal lain yang kembali secara reguler ke pelabuhan, dimana inspeksi berlangsung
- 36 Lihat catatan 8 untuk definisi kerja paksa
- 37 Sebagai contoh, Penyelidikan luar biasa dari Guardian selama enam bulan di tahun 2014. Lihat Guardian (2014, 10 June), *Revealed: Asian Slave Labour Producing Prawns for Supermarkets in US, UK*. Diambil dari: <https://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-labour>
- 38 Indonesia, di sisi lain, diberikan lampu hijau oleh EU, karena – menurut EU – pemerintah Indonesia memiliki niat yang jelas untuk melawan IUU. Lihat European Commission. (2016, 17 May). Diambil dari: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vella/blog/eu-traffic-light-system-fight-illegal-fishing-gives-indonesia-green-light_en
- 39 <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271297.htm> and See also: <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22916&LangID=E>
- 40 Beberapa dari ini dijadikan hukum. Sebagai contoh, undang-undang ketenagakerjaan Thailand menyatakan bahwa perempuan tidak boleh bekerja di bawah air, dan, jika hamil, perempuan tidak boleh bekerja di atas kapal. Bagian 38-39, Labour Protection Act 1998, Thailand
- 41 “Kerja yang feminin” yang dirujuk di sini pada proses di mana perempuan telah terkonsentrasi pada peran yang dibayar paling rendah dan paling tidak aman dalam rantai pasok pangan agribisnis.
- 42 Pembayaran upah per satuan didasarkan pada hasil pekerja (seperti berat udang yang dikupas), daripada waktu bekerja. Sebagaimana dicatat ILO, “ Di negara-negara berkembang, pekerja yang mengandalkan upah per satuan seringkali merupakan bagian dari pekerja yang rentan, dimana sebagian besar dari mereka bekerja di ekonomi informal. Jumlah terbesar adalah perempuan. Pengupahan per satuan juga sering terjadi di sektor tekstil, garmen, alas kaki dan industri kulit, serta dalam rantai pasok global.” http://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/WCMS_439067/lang--en/index.htm
- 43 M. Mason et al. (2015). *Global Supermarkets Selling Shrimp Peeled by Slaves*. Associated Press. Diambil dari: <https://apnews.com/0d9bad238bc24a059beeb4041aa21435/ap-global-supermarkets-selling-shrimp-peeled-slaves>
- ILO dan Asian Research Center for Migration. (2013). *Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector*. Bangkok: ILO. Diambil dari: http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_220596/lang--en/index.htm
- The Asia Foundation dan ILO. (2015). *Migrant and Child Labour in Thailand's Shrimp and Other Seafood Supply Chains: Labour conditions and the decision to study or work*. Bangkok: The Asia Foundation and ILO. Diambil dari: <http://asiafoundation.org/publication/migrant-and-child-labor-in-thailands-shrimp-and-other-seafood-supply-chains/>
- 44 Oleh M Ambari. (2017, 25 January). Indonesia Wajibkan Pelaku Industri Perikanan dan Kelautan Miliki Sertifikat HAM. Didapatkan dari: <http://www.mongabay.co.id/2017/01/25/indonesia-wajibkan-pelaku-industri-perikanan-dan-kelautan-miliki-sertifikat-ham/>
- 45 Kasus Benjina pertama kali diekspos oleh investigasi yang dilakukan oleh Associated Press pada tahun 2015. Lihat R. McDowel. (2015, 25 Maret). AP Investigation: Are slaves catching the fish you buy? Diperoleh dari: <https://apnews.com/b9e0fc7155014ba78e07f1a022d90389/ap-investigation-are-slaves-catching-fish-you-buy>
- 46 M. Idris. (2018, 27 March). Ini Cara Menaker Hilangkan Eksploitasi ABK di Kapal. Diperoleh dari: <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3940282/ini-cara-menaker-hilangkan-eksploitasi-abk-di-kapal>
- 47 M. Mendoza (2016) ‘Promises Unmet as Thailand Tries to Reform Shrimp Industry’ The Associated Press, 22 September: <http://bigstory.ap.org/article/7654543c4ae04421ad423abea422e0b4/promises-unmetthailand-tries-reform-shrimp-industry>
- 48 <https://www.nestle.com/asset-library/documents/media/news-feed/thai-union-nestle-new-demo-boat-dec-2017.pdf>
- 49 <http://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/Thai-Union-Greenpeace-Summary-of-Agreement.pdf>
- 50 http://investor.thaiunion.com/news.html/id/531239/group/newsroom_press
- 51 <http://www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release/802/dr-darian-mcbain-statement-at-opening-ceremony-at-thailand-ministry-of-foreign-affairs-international-conference-on-united-partnerships-against-human-trafficking>
- 52 <http://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20160116-ethical-migrant-recruitment-policy.pdf>
- 53 Thai Union pertama kali menerbitkan sebuah pernyataan bawah Undang-Undang Perbudakan modern UK pada tahun 2016 dan kemudian diperbarui pada bulan April 2018. Pernyataan itu mengungkapkan bahwa kerangka kerja dan kegiatan hak asasi manusia Thai Union harus ditingkatkan, khususnya terkait uji kelayakan pada perbudakan dan hak asasi manusia modern yang menjadi pelanggaran dalam rantai pasok. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami pendekatan manajemen Thailand Union untuk mengidentifikasi risiko hak asasi manusia dan dengan tepat merancang kebijakan dan langkah-langkah hak asasi manusia untuk mengatasinya. Lihat <http://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/TU-modern-slavery-2017-en.pdf>
- 54 Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) (2017) ‘Best Practice Guidance on Ethical Recruitment of Migrant Workers’, New York: ICCR: <http://www.iccr.org/sites/default/files/iccrsbestpracticeguidanceethicalrecruitment05.04.17.pdf>

- 55 CP (2017) 'Charoen Pokphand Foods Public : CP Foods launches 'Labour Voices' hotline and training program', 4traders.com, 22 November: <http://m.4-traders.com/CHAROEN-POKPHAND-FOODS-PU-10859580/news/Charoen-Pokphand-Foods-Public-CP-Foods-launches-lsquo-Labour-Voices-rsquo-hotline-and-training-p-25556304/>. See also LPN (2017) 'Charoen Pokphand Foods Public: CP Foods launches 'Labour Voices' hotline and training program', 22 November: <https://www.facebook.com/sompong.srakaew/posts/1798609580180289>
- 56 Verité (2016) 'Recruitment Practices and Migrant Labour Conditions in Nestlé's Thai Shrimp Supply Chain', Verité: <https://www.verite.org/recruitment-practices-and-migrant-labor-conditions-in-nestles-thai-shrimp-supply-chain/> Nestle (2016) 'Responsible Sourcing of Seafood -Thailand Action Plan 2015-2016', Nestle: http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/corporate_social_responsibility/nestle-seafood-action-plan-thailand-2015-2016.pdf
- 57 Tesco (2017) Pernyataan Perbudakan Modern, Mei: https://www.tescopl.com/media/392433/modern_slavery_act.pdf
- 58 Lihat: <https://www.iffors.com/>
- 59 AEON (2017) 'Formulation of Aeon Sustainable Procurement Policy and Sustainable Procurement Goals for 2020', Press Release, 19 April: https://www.aeon.info/common/images/en/pressroom/imgsrc/170419R_1_1.pdf; Marine Stewardship Council (2016), 'Sainsbury's no 1 UK retailer for sustainable seafood, Lidl nets third place', 29 January: <https://www.msc.org/about-us/msc-USA/news-1/newsitem/sainsburys-no-1-uk-retailer-for-sustainable-seafood-lidl-nets-third-place>
- 60 AEON (2017) 'Formulation of Aeon Sustainable Procurement Policy and Sustainable Procurement Goals for 2020', News Release, 19 April: https://www.aeon.info/common/images/en/pressroom/imgsrc/170419R_1_1.pdf; Marine Stewardship Council (2016), 'Sainsbury's no 1 UK retailer for sustainable seafood, Lidl nets third place', 29 Januari: <https://www.msc.org/about-us/msc-USA/news-1/newsitem/sainsburys-no-1-uk-retailer-for-sustainable-seafood-lidl-nets-third-place>
- 61 <https://www.issarainstitute.org/inclusive-labour-monitoring>
- 62 <https://www.ihrb.org/employerpays/leadership-group-for-responsible-recruitment>
- 63 <http://www.seafoodtaskforce.global/wp-content/uploads/2017/12/Seafood-Task-Force-Multi-Stakeholder-Report-Nov-2017.pdf>
- 64 Lihat analisis lebih lanjut: Freedom Fund dan Humanity United (2016) 'Assessing Government and Business Responses to the Thai Seafood Crisis', New York and Washington, D.C.: FF and HU: <http://freedomfund.org/our-reports/thai-seafood-report/>
- 65 T. Levitt (2016) 'Blockchain technology trialled to tackle slavery in the fishing industry' The Guardian, 7 September: <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/sep/07/blockchain-fish-slavery-free-seafood-sustainable-technology>
- 66 The Guardian: <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/may/11/seafood-industry-sustainable-fishing-salmon-overfishing>
- 67 MSC mengindikasikan kepada Oxfam bahwa beberapa langkah pertama untuk mengatasi tenaga kerja haknya telah diambil dan yang rencananya akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang.
- 68 ASC berusaha mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan sertifikasi grup pada tahun 2018.
- 69 Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia. (Forthcoming 2018). *Indonesia Seafood Workers and Farmers Case Study*.
- 70 ILO. (2018). *Baseline research findings on fishers and seafood workers in Thailand*. Diambil dari: http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_619727/lang--en/index.htm
- 71 HRW. (2018). *Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in Thailand's Fishing Industry*. Diambil dari: <https://www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rights-abuses-and-forced-labor-thailands-fishing-industry>
- 72 The Civil Society Organisation Coalition for Ethical and Sustainable Seafood, 'Falling through the Net: A survey of basic labour rights among migrants working in Thailand's fishing sector' (forthcoming 2018)
- 73 Referensikan Lampiran Metodologi untuk rincian lengkap terkait metode penelitian
- 74 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf
- 75 Dalam Civil Society Organisation Coalition for Ethical and Sustainable Seafood survey, 32% responden memperkirakan bekerja lebih dari 14 jam sehari, 40% melaporkan bekerja 11-14 jam sehari dan 28% melaporkan bekerja 6-10 jam sehari.
- 76 Untuk mendukung peluncuran kampanye baru Oxfam, Oxfam dan mitranya melakukan survei Skala Pengkajian Kerawanan Pangan Rumah Tangga dengan pekerja dan petani skala kecil yang bekerja di rantai pasok supermarket di berbagai negara.
- 77 Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia. (Forthcoming 2018). *Indonesia Seafood Workers and Farmers Case Study*.
- 78 Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia. (Forthcoming 2018). *Indonesia Seafood Workers and Farmers Case Study*.
- 79 Referensikan Lampiran Metodologi untuk rincian lengkap terkait metode penelitian
- 80 Referensikan laporan utama
- 81 Sebagaimana yang dicatat oleh Institut Hak Asasi Manusia dan Bisnis, "Besarnya tunjangan rekrutmen dapat menjerumuskan pekerja dalam situasi perbudakan utang, suatu bentuk kerja paksa di mana tenaga seseorang diminta sebagai sarana untuk membayar kembali pinjaman, menjebak individu dalam bekerja dengan upah sedikit atau tidak sama sekali sampai hutang dilunasi. Individu yang terjerat hutang kurang mampu melakukan penawaran untuk gaji yang lebih baik atau kondisi kerja atau untuk menuntut hak mereka. Hutang yang berat dapat secara

- serius mengikis nilai remitansi yang dikirim kembali ke rumah, dengan konsekuensi negatif bagi keluarga dan ekonomi lokal di negara asal." https://www.ihrb.org/pdf/reports/IHRB_Briefing_Recruitment_Fees-May-2016.pdf
- 82 UU No. 13 2013 di Indonesia mengatakan bahwa pekerja kontrak tidak boleh menjadi bagian penting dalam bisnis produksi utama perusahaan.
- 83 Dilaporkan dalam wawancara yang dilakukan di Indonesia oleh konsultan penelitian pada pertengahan 2017. Tidak dipublikasikan.
- 84 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003: Pasal 59 ayat 4: Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dapat dilakukan untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk periode lain yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- 85 Hukum Thailand mewajibkan lembur untuk dikompensasi pada tingkat yang tidak kurang dari 1,5 kali upah per jam atau upah per satuan, memberikan penghasilan kepada pekerja yang diwawancarai oleh Oxfam sebuah tambahan sejumlah 56 hingga 60 baht per jam.
- 86 Provinsi Chumphon, Samut Sakhon, dan Songkhla.
- 87 Untuk mendukung peluncuran kampanye baru Oxfam, Oxfam dan mitranya melakukan survei Skala Pengkajian Kerawanan Pangan Rumah Tangga dengan pekerja dan petani skala kecil yang bekerja di rantai pasok supermarket di berbagai negara.
- 88 Peraturan Indonesia untuk upah minimum ditetapkan dalam UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88, 89, dan 90. Upah minimum ditentukan setiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten. Upah minimum yang relevan di area pengolahan dan penghasilan udang meliputi: upah minimum per bulan Surabaya adalah Rp 3.296.712 di Lamongan sebesar Rp 1.702.772, di Tulang Bawang sebesar Rp 1.771.000.
- 89 "Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: (a) 7 (tujuh) jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau (b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu." UU Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 nomer 2
- 90 UU Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 Tahun 2003 pasal 93 nomor 2: (1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; yang berarti pekerja yang sakit, baik yang berstatus tetap ataupun tidak tetap, harus tetap dibayar meskipun tidak bekerja sama sekali, 100% selama 4 bulan pertama. (...)"
- 91 UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 81 (1): Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.
- 92 Untuk membentuk keterikatan antara supermarket dan pemasok pangan laut di Indonesia dan Thailand, Oxfam melakukan penelitian menggunakan kombinasi produk-*spotting* di supermarket, peninjauan catatan pengiriman internasional dalam *database online*, informasi produk di situs web pengecer, dan penelitian lainnya. Supermarket kemudian diminta untuk mengonfirmasi bahwa mereka mendapatkan sumber dari pemasok tersebut.
- 93 Ahold Delhaize memberi konfirmasi kepada Oxfam bahwa mereka mendapatkan udang langsung dari salah satu pemasok yang sebagian pekerjaannya diwawancarai untuk operasi Ahold Delhaize AS. Perusahaan menetapkan bahwa jaringan supermarket Belanda Albert Heijn "telah menerima produk dari produsen yang disebutkan" melalui pemasok perantara. Perusahaan juga mengindikasikan bahwa berdasarkan informasi mereka, mereka "tidak mengenali masalah" yang dijelaskan dalam bukti yang diberikan Oxfam kepada mereka untuk ditanggapi.
- 94 "Dalam tanggapannya terhadap Oxfam, Jumbo mengonfirmasi hubungannya dengan salah satu perusahaan. Jumbo pada saat yang sama menyatakan bahwa kebijakan utamanya untuk mengatasi masalah hak-hak pekerja dan kondisi kehidupan dalam rantai pasoknya, termasuk untuk pangan laut, adalah melalui sertifikasi.
- 95 Standar ASC berisi kriteria terkait 'kontrak yang adil dan transparan'. Namun hal ini tidak menjamin harga yang lebih baik bagi petani.
- 96 Referensikan laporan utama
- 97 Catatan kaki terkait bagian yang relevan dalam laporan peluncuran
- 98 Tren ini didasarkan pada rata-rata distribusi nilai berdasarkan negara-negara konsumen yang teridentifikasi. Namun ada perbedaan dalam tren di masing-masing negara konsumen. Di Inggris dan Belanda, misalnya, penelitian BASIC menunjukkan bahwa pangsa terbesar dari harga konsumen akhir pada tahun 2015 masih ada pada produsen makanan, yang seringkali merupakan pemasok lapis pertama supermarket. Sementara di AS dan Jerman, saham supermarket lebih dekat mengikuti tren rata-rata. Namun, dalam semua contoh, pangsa yang diperoleh pengolah/pedagang menurun secara signifikan dalam periode yang dinilai.
- 99 Tren ini didasarkan pada rata-rata dari distribusi nilai berdasarkan negara-negara konsumsi yang teridentifikasi. Namun, ada perbedaan dalam tren di masing-masing negara konsumsi. Di Inggris dan Belanda misalnya, penelitian BASIC menunjukkan bahwa pangsa terbesar dari harga konsumen akhir pada tahun 2015 masih terletak pada produsen makanan yang sering menjadi pemasok utama supermarket. Sementara di AS dan Jerman, pangsa supermarket lebih dekat mengikuti tren rata-rata. Bagaimanapun, dalam keseluruhan empat contoh tersebut, pangsa yang mencapai pengolah/pedagang telah menurun secara signifikan dalam periode yang dinilai.
- 100 Definisi *Free on Board (FOB)* adalah eksportir berkewajiban membayar biaya pengiriman barang tiba di pelabuhan terdekat dari gudangnya
- 101 R. Willoughby and T. Gore. (2018). *Ripe for Change*. Op. cit.

- 102 Oxfam *Steps to a Living Wage* (Rachel Wilshaw paper)
- 103 Upah Minimum Asia merupakan estimasi yang tidak sempurna akan upah layak, dirancang untuk pekerja garmen di wilayah ini, namun dapat menjadi tolak ukur yang berguna untuk menunjukkan pembagian yang marjinal atas nilai harga yang dibayarkan oleh konsumen-akhir kepada industri
- 104 Lihat lampiran metodologi untuk deskripsi mengenai metodologi dan asumsi seputar kesenjangan upah hidup dalam sektor udang.
- 105 *ibid.*
- 106 Untuk perhitungan ini, Upah Lantai Asia telah digunakan sebagai perkiraan 'upah layak'. Lihat catatan 19 untuk lebih jelasnya.
- 107 Rodrik, D. (1997) *'Has globalisation gone too far?'* Washington: Institute for International Economics
- 108 ILO, (2015) *Trends in Collective Bargaining Coverage: Stability, erosion or decline?* [http://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_409422/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_409422/lang-en/index.htm)
- 109 International Trade Union Confederation (2017), *Global Rights Index*, Brussels: ITUC
- 110 D. Vaughan-Whitehead and L.P. Caro (2017), *Purchasing Practices and Working Conditions in Global Supply Chains: Global Survey Results*, Geneva: International Labour Organisation
- 111 D. Vaughan-Whitehead and L.P. Caro (2017), *Purchasing Practices and Working Conditions in Global Supply Chains: Global Survey Results*, Geneva: International Labour Organisation
- 112 Wawancara, ILO, November 2017.
- 113 The Civil Society Coalition for Ethical and Sustainable Seafood. (2018). *Falling through the Net: A survey of basic labour rights among migrants working in Thailand's fishing sector*. Proporsi tinggi ini konsisten dengan penelitian ILO sebelumnya pada tahun 2013. ILO and Asian Research Center for Migration. (2013). *Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector*. *Op. cit.*
- 114 Okezone News. (2018, 6 February). Menteri Hanif Anjurkan Perusahaan Miliki Serikat Pekerja. Diambil dari: <https://news.okezone.com/read/2018/02/06/337/1855598/menteri-hanif-anjurkan-perusahaan-miliki-serikat-pekerja#lastread>
- 115 Bangkok Post (2017) *'Fishers, NGOs unite against IUU'*, Bangkok Post, 1 Februari: <https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20170201/281590945291318>; Art Prapha (2016) *'Is Your Shrimp Salad Causing Inequality in Asia?'* Oxfam blog, 31 Maret: <https://politicsofpoverty.oxfamamerica.org/2017/03/is-your-shrimp-salad-causing-inequality-in-asia/>
- 116 Bangkok Post (2015) *'Fishing for ethical business'*, Bangkok Post, 20 Agustus: <http://www.bangkokpost.com/print/662872/>
- 117 Untuk info lebih lanjut, lihat: <https://www.fairagora.com/blue-brand>
- 118 International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF) (2015) *'Organising Globally to Fight Exploitation in Fisheries and Aquaculture'*, *International Meeting of Fishing Industry and Aquaculture Workers' Unions*, 23-24 November 2015: <http://www.iufdocuments.org/aq2015/en/IUF%20SEAF00D%20SL0%20MEETING%20FULL%20REPORT%202015.pdf>
- 119 The Jakarta Post (2014) *'Lampung shrimp farmers work independently'*, The Jakarta Post, 11 Februari: <http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/11/lampung-shrimp-farmers-work-independently.html>
- 120 UNGPs ref
- 121 Oxfam juga menemukan ini dalam pengalaman mereka melakukan analisis kesenjangan dengan Unilever di Vietnam <https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/labour-rights-in-unilevers-supply-chain-from-compliance-to-good-practice-an-oxf-267532>
- 122 Lihat Bab 4 dari laporan utama untuk detail lebih lanjut tentang skor awal perusahaan, dan Lampiran X untuk perincian lebih lanjut tentang metodologi Scorecard.
- 123 Lihat Prinsip Perusahaan / Pemberi kerja dalam memberikan upah: <https://www.ihrb.org/employerpays/the-employer-pays-principle>

PENELITIAN DAN ANALISIS DI INDONESIA *CO-AUTHORED* DENGAN
ALIANSI PANGAN LAUT BERKELANJUTAN INDONESIA



ALIANSI PANGAN LAUT
BERKELANJUTAN
INDONESIA
The Sustainable Seafood Alliance Indonesia

KIARA
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan



YAYASAN LEMBAGA
BANTUAN HUKUM
INDONESIA
YLBHI